

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN *OFFICE CHENNELING*
TERHADAP PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA (DPK)
DI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
PERIODE 2014–2017**

Skripsi

**Ditujukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

Rini Nelsiana

NPM: 1551020285

Program Studi: Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M**

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN *OFFICE CHANNELING*
TERHADAP PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA (DPK)
DI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
PERIODE 2014–2017**

Skripsi

**Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

Rini Nelsiana

NPM: 1551020285

Program Studi: Perbankan Syariah

Pembimbing I

: Dr. Nasruddin, M.Ag.

Pembimbing II

: Agus Kurniawan, M.S.Ak.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya. Tujuan dari kegiatan usaha Perbankan yaitu memperoleh keuntungan dimana keuntungan ini salah satunya diperoleh dari penghimpunan Dana Pihak ketiga (DPK) karena dari dana ini lah bank dapat memberikan pembiayaan pada masyarakat dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Salah satu kendala Perbankan Syariah adalah keterbatasan jaringan Oleh karena itu pada tahun 2006 dalam PBI No. 8/3/PBI/2006 terbentuklah kebijakan *Office Channelling* yang artinya mekanisme layanan Syariah, dimana Bank konvensional yang dapat membuka layanan syari'ah atau dinamakan Unit Usaha Syariah.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: apakah terdapat pengaruh Kebijakan *Office Channeling* terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Di Perbankan Syariah Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian adalah penelitian asosiatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan studi kepustakaan..Variable independen dalam penelitian ini adalah kebijakan *Office Channeling*, sedangkan variable dependennya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Populasi yang di gunakan yaitu seluruh Bank Umum Konvensional yang menerapkan kebijakan *Office Channeling* di Indonesia. Teknik penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan bank umum konvensional yang menerapkan kebijakan *Office Channeling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana, uji asumsi klasik dan uji hipotesis yaitu uji t secara parsial, pengolahan data dengan menggunakan SPSS V.23.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kebijakan *Office Channeling* berpengaruh positif dan signifikansi terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga. Berdasarkan hasil uji determinasi nilai *R square* atau r^2 sebesar 0,381. Hal ini berarti 38,1% variable dependen yaitu pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dapat dijelaskan oleh variable independen yaitu kebijakan *Office Channeling* (OC), sedangkan sisanya ($100\% - 38,1\% = 61,9\%$) dijelaskan oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan regresi.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah *Office Channeling* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga. Hal ini di karenakan semakin banyak jumlah kantor cabang maka jumlah dana pihak ketiga yang mampu dihimpun akan semakin meningkat, sehingga bank dapat memberikan pembiayaan kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan yang maksimal.

Kata kunci : Dana, *Office Chenneling*, Pengaruh



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN OFFICE
CHANNELING TERHADAP PERTUMBUHAN DANA
PIHAK KETIGA DI PERBANKAN SYARIAH
INDONESIA PERIODE 2014-2017**

Nama : Rini Nelsiana

NPM : 1551020285

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Dr. Nasruddin, M. Ag.
NIP.195809241990031003**

Pembimbing II

Agus Kurniawan, M. S. Ak

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.,Sy.
NIP.198208082011012009**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN OFFICE CHANNELING TERHADAP PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) DI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA PERIODE 2014-2017**, disusun oleh **RINI NELSIANA, NPM :1551020285**, Jurusan : **Perbankan Syariah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/ Tanggal : **Jum'at, 23 Agustus 2019**.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Hj. Heni Noviarita, M. Si.

Sekretaris : Muhammad Iqbal Fasha, M.E.I

Penguji 1 : Dr. Erike Anggraeni, M.E., Sy.

Penguji II : Dr. H. Nasruddin, M.Ag.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121001

MOTTO

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah disisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”¹(Qs. Ar-Ruum: 39)



¹ Dapertemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: CV. Diponegoro, 2013), h. 407.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Rispalmudin dan Ibu Hartini yang tiada henti-hentinya dalam berdoa dan mencurahkan kasih sayangnya untukku, anugerah Allah SWT yang luar biasa diberikan kepadaku karena telah memiliki orang tua yang tulus mencintaiku, mengasuh, membesarkan, mendidik dengan kasih sayang, kesabaran dan selalu memotivasi penulis. Terimakasih atas tetesan keringat dan perjuangannya memberikan dorongan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari dunia sampai akhirat.
2. Kepada Adikku Kiki Kurniansyah yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Alamamaterku kampus hijau UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rini Nelsiana, dilahirkan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan pada tanggal 16 Mei 1997.

Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Rispalmudin dan Ibu Hartini:

Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) I Tanjung Kurung Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan selesai pada tahun 2009.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) I Tanjung Kurung Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan selesai pada tahun 2012.
3. Madrasah Aliyah (MA) Radudlatul Muta'alimin Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan selesai pada tahun 2015.
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan keperguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selama diperkuliahan, penulis aktif di dalam kepengurusan kegiatan mahasiswa kampus, seperti:

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas, LDF IKRIMAH, sebagai kepala bidang KIMA (Kajian Mahasiswa).
2. Unit kegiatan Mahasiswa Bidang Pembinaan Dakwah (UKM BAPINDA) UIN Raden Intan Lampung, sebagai anggota.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh Kebijakan *Office Channeling* Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga di Perbankan Syariah Indonesia Periode 2014-2017” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta tidak mengurangi rasa terima kasih atas bantuan semua pihak, maka secara khusus peneliti menyebutkan beberapa, sebagai berikut:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan 1, 2 dan 3, yang senantiasa tanggap dan kritis terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.,Sy. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Drs. Nasruddin, M.Ag, dan Agus Kurniawan, M.S.Ak. selaku pembimbing I dan II yang dengan sabar memberikan pengarahannya, saran dan bimbingan hingga penulisan skripsi ini selesai, semoga barokah ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama ini.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.
6. Segenap keluarga yang ku sayangi Susi Lawati dan Syahrudin beserta keluarga-keluarga lainnya yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2015 khususnya kelas D yang telah bersamaan mengukir sejarah, kenangan, dan pengalaman hingga saat ini serta motivasi selama penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Siti Nurratih, Retno Dwi Nurfalah, Meinaroza, Elisa Lailatul, Astuti Mutoharoh, beserta teman-teman kosan Dahlena,

Eka Nova, Dewi Maulida Dan Yuris Via, yang selalu memberikan semangat, dan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan Ponpes Raudlatul Muta'alimin kepada Wulan Suci dkk. yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya, semoga Allah selalu melancarkan studi kita semua dan mencapai kesuksesan.

9. Rekan-rekan KKN 263 Etika Yolan Melati, Lisa Maydariscy terima kasih atas dukungan dan semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini dan
10. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Bapak, Ibu, Teman dan Saudara semuanya dengan amal ibadah masing-masing. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca dapat memberi masukan, saran, dan kritikan yang membangun, guna melengkapi tulisan ini.

Bandar Lampung, 2019

Penulis

Rini Nelsiana

NPM. 1551020285

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Batasan Masalah	17
E. Rumusan Masalah.....	17
F. Tujuan Penelitian	18
G. Manfaat Penelitian	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Grand Theory	
1. Teory Sinyal (<i>Signaling Theory</i>)	19
B. Bank Syariah	
1. Bank Syariah.....	21
2. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah.....	24
3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah.....	25
4. Landasan Oprasional Bank Syariah	26
C. Laporan Keuangan	
1. Pengertian Laporan Keuangan dan Audit.....	27
2. Tujuan Laporan Keuangan.....	28
3. Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah	29
4. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Bank Syariah	30
D. <i>Office Chenneling</i> (Layanan Syariah)	
1. Pengertian <i>Office Chenneling</i>	31
2. Tujuan <i>Office Chenneling</i>	33
3. Dasar Hukum <i>Office Chenneling</i>	33
4. Kelebihan Dan Kekurangan <i>Office Chenneling</i>	34
5. <i>Office Chenneling</i> Dalam Perspektif Islam	38
E. Sumber Dana Bank Syariah	

1. Dana Bersumber dari Bank itu Sendiri	41
2. Dana yang Berasal dari Masyarakat Luas	42
3. Dana yang Bersumber dari Lembaga Lain	42
F. Dana Pihak Ketiga (DPK)	
1. Giro (<i>Demand Deposit</i>)	44
2. Tabungan Syariah (<i>Saving Deposit</i>)	47
3. Deposito (<i>Time Deposit</i>)	49
4. Pengumpulan Harta Melalui Zakat, Infaq dan Shodaqoh	
a. Pengumpulan	50
b. Penyaluran	52
c. pemberdayaan	52
G. Tinjauan Pustaka	53
H. Kerangka Berfikir	58
I. Hubungan Variabel dan Pengembangan Hipotesis	59

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian	63
B. Sumber Data	64
C. Populasi dan Sampel Penelitian	64
D. Metode Pengumpulan Data	67
E. Variable Penelitian	64
F. Definisi Operasional Variabel	68
G. Metode Analisis Data	
1. Uji Normalitas	69
2. Uji Hipotesis	
a. Regresi Linear Sederhana	70
b. Uji Parametrik Individual (uji t)	71
c. Uji Determinasi	72

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Uji Normalitas	73
B. Uji Hipotesis	
1. Uji Regresi Dan Persamaan Regresi	74
2. Uji Determinasi (r^2)	76
3. Uji Parametrik Individual (t)	77
C. Pembahasan	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1.1	Jumlah Jaringan Kantor Cabang BUS, UUS dan BPRS	8
Tabel 1.2	Jumlah Layanan Syariah	12
Tabel 2.1	Kelebihan Dan Kekurangan OC	38
Tabel 3.1	Difinisi Oprasional Variabel	68
Tabel 4.1	Hasil Uji Normalitas	73
Tabel 4.2	Hasil Uji Regresi Sederhana Dan Persamaan Regresi	74
Tabel 4.3	Hasil Uji Determinasi.....	76
Tabel 4.4	Hasil Uji Parametrik Individual	77



DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar

Tabel 2.1	Kerangka Berfikir	59
-----------	-------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN OFFICE CHANNELING TERHADAP PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA DI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA PERIODE 2014-2017**”.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari judul tersebut, ada beberapa istilah yang perlu penulis uraikan, antara lain:

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹
2. **Pengaruh** adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.²

¹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ke-4* (Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.

² Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ke-2* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 102.

3. **Office Channeling** adalah kegiatan penghimpun dana yang dilakukan di kantor cabang dan atau di kantor di bawah kantor cabang untuk dan atas nama kantor cabang syariah pada bank yang sama.³
4. **Dana Pihak Ketiga** adalah dana yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro, tabungan dan deposito. Atau disebut juga dana yang berasal dari masyarakat.⁴
5. **Perbankan** adalah suatu lembaga keuangan atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Alasan dipilihnya judul penelitian ini ialah berdasarkan alasan objektif dan secara subjektif adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Pada dasarnya tujuan Perbankan Syariah adalah bagaimana suatu bank dapat menghimpun dana dan menyalurkannya secara maksimal, terkhusus pada Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mana dana ini merupakan dana penting bagi suatu bank di bandingkan dengan dana sendiri. Semakin banyak dana yang dapat dikumpulkan

³ PBI No. 8/3/PBI/2006 Tentang perubahan kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet. 7 (Jakarta: Azkia Publizer, April 2009), h. 60.

⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, ke-1 (Kencana: Prenamedia Group, 2010), h. 3.

oleh suatu Bank maka akan semakin baik kinerja Bank tersebut. Kegiatan Bank adalah menghimpun dan menyalurkan dananya pada masyarakat baik dalam bentuk simpanan maupun dalam bentuk pembiayaan, dana yang disalurkan dan dihimpun untuk masyarakat ini salah satunya dari dana pihak ketiga, karena dari dana ini lah bank dapat memberikan pembiayaan pada masyarakat dan memperoleh keuntungan yang maksimal.

Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank merupakan kegiatan utama bagi Bank dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kembali dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Untuk meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga ini maka Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkannya, salah satu kebijakan dari Bank Indonesia untuk Perbankan Syariah adalah *Office Channeling*. Dimana kebijakan ini diharapkan akan dapat mendorong angka pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Untuk melihat apakah pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah di Indonesia hal ini dapat dilihat dari seberapa besar kebijakan *Office Channeling* dapat memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan dana pihak ketiga tersebut.

2. Alasan Subjektif

Pokok bahasan dalam skripsi ini sesuai dengan ilmu yang dipelajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan

Syariah. *Literatur* dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini tersedia di perpustakaan dan di *website* bank yang berhubungan dengan laporan keuangan yang sudah di audit sehingga skripsi ini dapat diselsaikan.

C. Latar Belakang Masalah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadist Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya pembayaran serta predaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam.⁶ Berdasarkan beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an, terdapat konsensus di antara para ahli hukum dan para ahli teologi muslim bahwa riba di larang oleh Islam, atas keharaman riba seperti yang diterangkan dalam (Qs. Ali Imron:130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*⁷

⁶ Muhammad, *Menejemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 2.

⁷ Arham Bin Ahmad Yasin, *Mushab Ash-Shahib*, (Hilal Media, 2015), h. 27.

Riba di sini ialah Riba *Nasi'ah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa Riba *Nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: *Nasiah dan fadhl*. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba *Nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Usaha Perbankan itu sendiri baru dimulai dari zaman Babylonia kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Namun, pada saat itu tugas utama Bank hanyalah sebagai tempat tukar-menukar uang. Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan, perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia Perbankan tidak terlepas dari perkembangan dunia perdagangan. Perkembangan Perbankan diawali dengan Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa yaitu Bank Vanesia Tahun 1171, kemudian menyusul Bank Of Genoa dan Bank Of Barcelona 1330.⁸ Bank Syariah diawali dengan berdirinya sebuah Bank tabungan lokal yang beroperasi tanpa bunga di Desa Mit Ghamir yang berlokasi di tepi sungai Nil Tahun 1963 oleh DR. Abdul Hamid an-Naggar.

⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 28.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Begitu pentingnya peran Perbankan, sehingga institusi bank yang merupakan institusi yang syarat dengan pengaturan dan pengawasan. Fungsi dari pengaturan dan pengawasan terhadap bank, termasuk di dalamnya Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berada dalam otoritas Bank Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terealisasi dari Bank apabila diperlukan. Fenomena pada masyarakat yang berada di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan Bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya, mereka beranggapan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang aman dan dapat dipercaya dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan.

Adapun aktivitas keuangan yang dimaksud adalah penyimpanan dan penyaluran dana. Bank merupakan lembaga keuangan intermediasi antara para penabung dan investor, tabungan dapat berguna apabila di investasikan, sementara para penabung tidak dapat diharapkan untuk

melakukannya sendiri dengan terampil dan sukses, nasabah mau menyimpan dananya di Bank karena ia percaya bahwa Bank dapat memilih alternatif investasi yang baik.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, diawali dengan Bank Syariah yang pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya sedikit terlambat dibandingkan dengan Negara-negara muslim lainnya, Perbankan Syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. Sementara itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 menjadi 88 buah.⁹ Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek Perbankan Syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik, hingga pada tahun 2011 sampai 2015 jumlah Bank Syariah di Indonesia semakin bertambah. Dengan perkembangan Perbankan Syariah yang semakin menunjukkan peningkatan maka hal ini juga berpengaruh pada banyaknya kantor cabang Bank Syariah. Selanjutnya perkembangan Perbankan Syariah dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami penambahan yang cukup baik.

Hal ini dapat dilihat pada jaringan kantor Perbankan Syariah yang di Indonesia dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:

⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 25.

Table 1.1
Jaringan Kantor BUS, UUS dan BPRS Tahun 2014-2017

Indikator utama	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah				
Jumlah Bank	12	12	13	13
Jumlah Kantor	2.163	1.990	1.869	1.825
Unit Usaha Syariah				
Jumlah Bank	22	22	21	21
Jumlah Kantor	320	311	332	334
BPRS				
Jumlah Bank	163	163	166	167
Jumlah Kantor	439	446	453	441

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan jaringan kantor Bank Umum Syariah (BUS) Pada tahun 2014 memiliki jumlah Bank sebanyak 12 bank dengan jumlah kantor sebanyak 2.163, pada tahun 2015 jumlah Bank Umum Syariah masih tetap yaitu 12 Bank dengan jumlah kantor yang mengalami penurunan yaitu 1.990, pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah Bank pada BUS yaitu sebanyak 13 namun jumlah kantor BUS justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 1.869, pada tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yaitu sebanyak 13 Bank dengan jumlah kantor yang kembali mengalami penurunan yaitu sebanyak 1.825. Sedangkan Pada Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2014 dengan jumlah Bank sebanyak 22, dan jumlah kantor sebanyak 320, pada tahun 2015 UUS memiliki jumlah Bank yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu 22 Bank, namun terjadi penurunan pada jumlah kantor yaitu 311, lalu pada tahun 2016 UUS memiliki jumlah Bank sebanyak 21, dan jumlah kantor yang mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya yaitu 332, sedangkan pada tahun 2017 UUS memiliki jumlah Bank 22 sama dengan tahun sebelumnya dan jumlah kantor yang masih mengalami peningkatan sebanyak 334 kantor. BPRS pada tahun 2014 memiliki jumlah Bank sebanyak 163 dengan jumlah kantor 439, kemudian pada tahun 2015 memiliki jumlah Bank 163 dan jumlah kantor sebanyak 446 kantor, pada tahun 2016 terjadi peningkatan dengan jumlah Bank 166 dan jumlah kantor yaitu 453, lalu pada tahun 2017 jumlah Bank menjadi 167 dan ini menunjukkan peningkatan namun pada jumlah kantor justru mengalami penurunan yaitu 441 kantor.

Peningkatan jumlah Bank Syariah maupun jumlah kantor hal ini menunjukkan eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah semakin meningkat. Karena pertumbuhan setiap Bank itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan Bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat.

Sejak awal pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia sampai masa perkembangan sekarang masih ada beberapa kendala yang di hadapi oleh Bank Syariah, salah satu permasalahannya adalah keterbatasan jaringan layanan Syariah. Keterbatasan layanan ini lah yang dapat berdampak kurangnya peningkatan kinerja usaha Bank Syariah.¹⁰ Menghambat kerjasama antar Bank Syariah, dan menyebabkan tidak meluasnya pelayanan Syariah bagi masyarakat sekitar dan membuat

¹⁰ Heirennisa Rohaya, "Perkembangan Skala Usaha Perbankan Syariah Di Indonesia Pra Dan Pasca Kebijakan *Office Channeling*", *Jurnal ekonomi islam UII*, Vol.2 No.1 (2008), h. 1.

masyarakat kurang meminati Bank Syariah. Ketika Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006 Yang diubah dengan nomor 9/7/PBI/2007 tentang perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pembukaan kantor Bank yang melaksanakan Kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah oleh Bank Konvensional. Hal penting dalam praturan tersebut adalah penerapan *Office Channeling* bagi Bank Umum Konvensional. Kebijakan ini merupakan trobosan baru bagi perkembangan industry Perbankan Syariah di Indonesia. Kebijakan *Office Channeling* di harapkan dapat meningkatkan akses masyarakat kepada jasa-jasa Perbankan Syariah dan dapat meningkatkan *market share* Perbankan Syariah. Dengan menggunakan system ini maka Bank Syariah tidak perlu lagi membuka cabang UUS di tempat, dalam memberikan pelayanan Perbankan Syariah. Sehingga biaya yang di keluarkan juga terbilang lebih efisien khususnya bagi Bank dan umumnya bagi masyarakat.

Pasca kebijakan *Office Channeling* yang diatur oleh Bank Indonesia dalam PBI No. 8/3/PBI/2006, yakni manakah di antara kedua macam Bank yaitu BUS dan UUS ini yang paling produktif dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK). Pertanyaan ini diungkapkan untuk mengukur kemampuan konsep perluasan jaringan dalam meningkatkan kemampuan Bank Syariah menyerap dana publik berdasarkan prinsip

Syariah.¹¹ Dalam konsep perluasan jaringan dikemukakan bahwa tingkat penghimpunan DPK sangat ditentukan oleh banyaknya jaringan operasional Perbankan Syariah dan banyaknya jumlah kantor layanan Syariah. Maka sudah seharusnya konsep perluasan jaringan dan banyaknya jumlah kantor layanan Syariah ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah keterbatasan jaringan pada Bank Syariah. *Office channelling* didefinisikan sebagai layanan yang terdapat di cabang.¹² Jadi, masyarakat dapat menggunakan jasa Perbankan tanpa harus mendatangi BUS tapi dengan kantor cabang Konvensional yang telah memiliki UUS maka masyarakat dapat bertransaksi sesuai Syariah, dengan singkatnya *Office Chanelling* adalah nasabah bisa melakukan berbagai transaksi keuangan Syariah dengan jasa Perbankan Konvensional.

Pada akhir Desember 2017 tercatat ada 21 Bank Umum Konvensional yang menerapkan kebijakan *Office Chanelling* yang mana sebelumnya total keseluruhan ada 23 Bank, kemudian pada akhir 2015 terdapat 2 Bank yang menerapkan kebijakan *Office Channeling* melakukan *spin off* menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Seperti yang dijelaskan pada table 1.2

¹¹ Moch. Edman Syarif, M. Muflih, "Komparasi Produktifitas Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada BUS dan UUS Pasca kebijakan *Office Channeling* Di Indonesia", *Jurnal Keuangan Syariah*, (2011), h. 4.

¹² Triyani, "Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Office Chenelling Terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah Priode 2015-2017", *Jurnal Perbankan Syariah*, (2018), h. 6.

Table 1.2
Jumlah Office Channeling

No	Bank	Jumlah Office channeling			
		2014	2015	2016	2017
1	Bank Danamon	1776	1518	3363	4957
2	Bank Permata	3022	3565	4456	4079
3	BII	2962	5362	4775	5002
4	Bank CIMB niaga	2636	1744	1976	1174
5	Bank OCBC	2017	2871	3230	3935
6	Bank Sinarmas	40	2561	468	546
7	BTN	464	2561	540	670
8	Bank BTPN	—	—	1264	—
9	BPD DKI	910	2571	1175	2016
10	BPD DIY	—	30	30	30
11	BPD jatim	436	1164	1264	2020
12	Bank Aceh	440	—	—	—
13	BPD sumut	2025	1031	1122	1122
14	BPD Riau kepri	334	624	642	147
15	BPD Sumsel/Babel	550	25	25	25
16	BPD Kalsel	440	25	350	450
17	BPD Kalbar	470	—	—	—
18	BPD Kaltim	156	473	470	470
19	BPD Jateng	810	597	1721	1790
20	BPD NTB	86	17	17	20
21	BPD Jambi			20	37
22	BPD Sumbar	489		420	420

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan data yang diperoleh dari statistic Perbankan Syariah yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dimana kebijakan *Office Chanelling* yang diterapkan oleh 21 Bank, terdapat beberapa Bank dengan jumlah *Office Chanelling* yang mengalami peningkatan dengan

baik, namun tidak sedikit juga dari Bank-bank diatas yang perkembangannya dari tahun-ketahun justru mengalami penurunan. Dapat kita lihat pada tahun 2014 Bank yang memiliki jumlah *Office Chanelling* tertinggi yaitu Bank Permata, dengan total 3022, dan jumlah *Office Chanelling* terendah yaitu BPD Nusa Tenggara Barat. Dengan total hanya 80 *Office Channeling*. Kemudian pada tahun 2015 jumlah *Office Channeling* tertinggi yaitu pada Bank Internasional Indonesia dengan total 5362, sedangkan jumlah terendah yaitu pada Bank Nusa Tenggara Barat dengan jumlah 17 *Office Channeling*. Pada tahun 2016 jumlah *Office Channeling* tertinggi yaitu pada Bank Internasional Indonesia dengan jumlah 4775, sedangkan jumlah terenda yaitu pada Bank Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2017 tercatat jumlah *Office Channeling* tertinggi yaitu Pada Bank Internasional Indonesia dengan jumlah 5002, dan terendah yaitu pada Bank Nusa Tenggara Barat dengan total 20 *Office Channeling*.

Dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa Bank yang setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan seperti pada Bank Internasional Indonesia dimana dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan pada jumlah *Office Channeling*, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan *Office Channeling* dapat diterima dengan baik dikalangan masyarakat, kemudian terdapat juga Bank yang justru setiap tahunnya mengalami penurunan seperti pada Bank Nusa Tenggara. Artinya tidak semua dari *Office Channeling* itu berkembang dengan baik. Dengan jumlah *Office Channeling* yang diterapkan oleh 21 Bank diatas maka harapannya akan

dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan pangsa pasar Perbankan Syariah di Indonesia dan akan semakin meningkatkan jumlah penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

Dana pihak ketiga (DPK) biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh Bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya. Adapun sumber dana yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu, Simpanan Giro (*demand deposit*), Tabungan (*seving*), Deposito (*time deposito*).¹³ Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan oprasional Bank dan merupakan ukuran keberhasilan Bank jika mampu membiayai oprasionalnya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Mudah dikarenakan asal dapat memberikan bunga yang relative tinggi dan dapat memberikan fasilitas menarik lainnya seperti hadiah dan pelayanan yang memuaskan menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Kemudian keuntungan lainnya dana yang tersedia dimasyarakat tidak terbatas. Kerugiannya adalah sumber dana dari sumber ini relative lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri.¹⁴

¹³ Ismail, *Menejemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Kencana, 2010), h. 43.

¹⁴ Kasmir, *Menejemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 53.

Perbedaan Bank Konvensional dan Syariah salah satunya dari investasi yang dilakukan oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan disalurkan dalam segi pembiayaan, Bank Syariah juga sangat selektif dalam memberikan pembiayaan yang hanya boleh pada investasi yang halal. Untuk itu perlu dikembangkan Perbankan Syariah dan diperbanyak layanan-layanan, karena telah memberikan efek yang positif terhadap perekonomian Indonesia.¹⁵ Perusahaan yang melakukan kerja sama usaha dengan bank syari'ah, haruslah Perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang halal. Bank Syari'ah tidak akan membiayai proyek yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan dalam Islam.

Sebaliknya, Bank Konvensional, tidak mempertimbangkan bagaimana dan akan diamankan penyaluran dananya, akan tetapi hanya melihat dari segi penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut Syariat Islam tergolong produk yang tidak halal. Misalnya proyek perusahaan minuman keras, dapat dibiayai oleh Bank Konvensional apabila proyeknya menguntungkan. Return yang diberikan oleh Bank Syari'ah kepada pihak investor, dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua pihak. Dari segi penghimpunan dana pihak ketiga, bila Bank Syari'ah memperoleh pendapatan besar, dan sebaliknya bila hasil Bank Syari'ah kecil maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah investor juga akan menurun.

Sebaliknya, dalam bank konvensional, return yang diberikan maupun yang

¹⁵ Ihsan Baik Siregar, "Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Jumlah Kantor Terhadap Market Share Bank Syariah Di Indonesia periode 2012-2016" *jurnal ekonomi syariah*, (2018), h. 8.

diterima dihitung berdasarkan bunga. Bunga dihitung dengan mengalikan antara presentase bunga dengan pokok pinjaman atau pokok penempatan dana, sehingga hasilnya akan tetap. Sistem Perbankan Syari'ah sangat baik diterapkan di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sudah seharusnya menegakkan sistem Perbankan Islam. Akan tetapi salah satu kendala utama pengaplikasian dan pengembangan Bank Syariah adalah keterbatasan jaringan.

Kebijakan *Office Channeling* ini dimaksudkan untuk mengarahkan aktivitas Perbankan agar mampu menunjang pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan Perbankan Syariah. Penerapan kebijakan ini akan semakin memudahkan akses masyarakat melakukan berbagai transaksi Syariah dan *Office Chanelling* juga dimaksudkan sebagai salah satu cara memperbesar pangsa pasar Bank Syariah. Dimana Pola *Office Chanelling* juga mempermudah nasabah dalam mengakses layanan Perbankan Syariah. Karena nasabah bisa datang ke kantor Bank konvensional. Dengan ini, akses terhadap lokasi Bank Syariah yang selama ini menjadi permasalahan akan dapat teratasi. Mengingat layanan syariah di Indonesia belum begitu banyak, maka sudah seharusnya kebijakan *Office Chanelling* ini berpengaruh positif bagi pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia pada masa yang akan datang. Semakin mudahnya masyarakat mendapatkan akses layanan Syariah, diperkirakan pertumbuhan Bank Syariah khususnya pada Pengimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah akan semakin

meningkat secara signifikan. Sehingga *market share* Perbankan Syariah terhadap Perbankan nasional akan meningkat.

Merujuk pada permasalahan yang telah di uraikan diatas, peneliti tertarik untuk mendapat gambaran secara empiris mengenai “**Analisis Pengaruh Kebijakan *Office Channeling* Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Di Perbankan Syariah Indonesia Periode 2014-2017**”.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini akan dikaji penilaian terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank, dari sisi perluasan jaringan dan banyaknya jumlah kantor layanan Syariah, dengan menggunakan data laporan keuangan Bank yang menerapkan kebijakan *Office Channeling*. Bank yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 9 Bank dari total keseluruhan 21 Bank, berdasarkan kriteria yaitu, banyaknya kantor cabang, kelengkapan data laporan keuangan beserta banyaknya jumlah Dana Pihak Ketiga.

E. Rumusan Masalah

Perubahan kebijakan pada suatu Bank akan berpengaruh pada penghasilan bank dimana penghasilan suatu bank itu dapat lihat melalui Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga. Semakin tinggi pertumbuhan dana pihak ketiga suatu Bank maka semakin besar penghasilan Bank tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Apakah terdapat pengaruh kebijakan *Office Channeling* terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di Perbankan Syariah Indonesia?

F. Tujuan Masalah

Pada dasarnya penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan *Office Channeling* terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Indonesia.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau melakukan penelitian yang khususnya mengenai lembaga keuangan Syariah yang ada di Indonesia.
2. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dan saran bagi pengembangan Bank Syariah untuk lebih meningkatkan kualitas serta dapat memperbanyak jaringan pelayanan bank terhadap masyarakat.
3. Bisa menjadi pertimbangan sekaligus arahan terhadap kebijakan yang akan diambil dengan melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan dari kebijakan *Office Channeling*.
4. Menambah wawasan ilmu, khususnya tentang lembaga-lembaga keuangan Syariah atau Perbankan Syariah.

BAB II

KAJIAN TORI

A. *Grand Theory*

1. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Menurut Brigham dan Houston isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, merupakan hal yang penting karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efeknya pada perusahaan.¹⁶

Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor. Dalam Perbankan sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut

¹⁶ Eugene F Brigman dan Joel F Houaton, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 36.

mengandung nilai positif maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.

Signaling Theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar, karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pada pihak luar (investor dan kreditur). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan.¹⁷ Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri adalah memberikan sinyal pada pihak luar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*). Secara garis besar *Signaling Theory* kaitannya dengan ketersediaan informasi.

Laporan keuangan yang mencerminkan kinerja baik merupakan signal atau tanda bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik. Signal baik akan direspon dengan baik pula oleh pihak luar, karena respon pasar sangat tergantung pada signal fundamental yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian, bank harus terus

¹⁷ Jogyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Yogyakarta: BPPE UGM, 2000), h. 570.

memberikan sinyal positif kepada para nasabah dan masyarakat agar nasabah memperoleh keyakinan penuh dan jaminan keamanan terkait dana yang telah disimpan pada bank yang bersangkutan. Selain itu, salah satu bentuk sinyal positif yang dapat dilakukan oleh perusahaan perbankan adalah dengan terus memberikan promosi-promosi dan kerja nyata untuk membuktikan bahwa bank tersebut lebih unggul dari pesaingnya dan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Secara umum, pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah Bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam. Bank Syariah adalah badan usaha atau lembaga keuangan yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip Syariah dengan pedoman utama Al-Quran dan Hadits.¹⁸

Bank Syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana ke pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha. Dalam perbankan syariah melarang menerima dan membayar riba menjadi inti (*nucleus*) dari system Bank Islam, atas keharaman riba'. Bank Syariah

¹⁸ Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 34.

dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam kegiatan ekonomi Syariah.¹⁹ Adapun jenis-jenis Perbankan Syariah berdasarkan kegiatannya adalah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

a. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank umum syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat menjadi sebagai Bank devisa atau nondevisa. Bank devisa adalah Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transaksi keluar negeri, inkaso ke luar negeri pembukaan L/C dan sebagainya.

b. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari perusahaan penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha penjaminan berdasarkan prinsip Syariah.²⁰

¹⁹ Kheirul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.16-17.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, Pasal 1 Ayat (17).

1) Kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS)

Menurut pasal 19 ayat (2) undang-undang Perbankan Syariah, kegiatan usaha UUS meliputi:²¹

- a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya.
- c) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna* atau akad lainnya.
- d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qard*
- e) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah dalam bentuk IMBT.

2) Kegiatan usaha yang di larang dalam UUS

- a) Melakukan kegiatan usaha yang melanggar prinsip syariah
- b) Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung dipasar modal.
- c) Melakukan kegiatan penyertaan pasar modal.
- d) Melakukan kegiatan perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi Syariah.²²

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Kencana: Prenamedia Group, 2014), h. 106.

c. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Kegiatan BPRS dalam undang-undang No. 21 meliputi, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan berdasarkan akad *wadi'ah*, kemudian investasi berupa deposito atau tabungan, menempatkan dana pada Bank Syariah lain, memindahkan uang, menyediakan produk dan dalam bentuk lainnya yang keduanya tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

2. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Seperti halnya pada bank umum, Bank Syariah juga memiliki fungsi yang sangat penting, diantara fungsi tersebut adalah:

- a. Memobilisasi tabungan masyarakat, baik asing maupun domestik.
- b. Menyalurkan dana tersebut secara efektif pada kegiatan-kegiatan yang produktif dan menguntungkan secara finansial, dengan tetap memperhatikan kesyariahan dalam kegiatan Bank Syariah tersebut.
- c. Melakukan fungsi regulator.
- d. Menjaga amanah yang di percaya kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip Syariah.²³

Adapun beberapa tujuan yang diharapkan dari system Perbankan Syariah antara lain:

- a. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas Bank agar sesuai dengan prinsip Islam

²² Nasyah Agus Saputra, "Kegiatan Usaha Perbankan Syariah". (Tesis Program Studi Perbankan Syariah, UMSurabaya, 2017), h. 9.

²³ *Ibid*, h. 37-38.

- b. Mengimpun dana sosial yang berasal dari wakaf dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*).
- c. Menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya.

3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Adapun prinsip Bank Syariah yang dianut ialah, sebagai pedoman untuk menjalankan aktivitasnya:²⁴

a. Prinsip keadilan (*Adl*)

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara nasabah dan pihak Bank.

b. Prinsip keseimbangan (*Tawazun*)

Yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial.

d. Prinsip kemaslahatan (*Maslahah*)

Yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan akhirawi, material dan spiritual, individual dan kolektif, serta harus memenuhi 3 unsur yang menjadi pedomannya yakni kepatuhan halal, bermanfaat dan membawa kebaikan, dan semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

²⁴ *Ibid*, h. 117-118.

e. Prinsip Universalisme (*Alamiyah*)

Yaitu dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*Rahmatan lil alamin*).²⁵

4. Landasan Oprasional Bank Syariah

- a. Tidak membenarkan transaksi spekulatif (*maysir*) jual beli atas suatu barang yang dibeli (*gharar*) dan jual beli bersyarat (mengandung unsur riba).

- Q.S Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya”. (QS. Ar-Rum: 39).

- b. Dalam bertransaksi dengan nasabah, bank syariah memposisikan diri sebagai mitra investor dan pedagang.

²⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Kencana: Kharisma Putra Utama, 2015), h. 26.

- c. Akad transaksi yang sudah disepakati dengan nasabah tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya, walaupun misalnya terjadi gejolak moneter.²⁶

C. Laporan keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan dan Audit

Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi, guna menentukan dan melaporkan taraf korespondensi antara informasi dan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Normalnya, para auditor menjalankan pekerjaan audit pada informasi terkuantifikasi, seperti laporan keuangan.²⁷

Audit Syariah adalah merujuk pada penilaian periodik yang diadakan dari waktu ke waktu untuk menyediakan penilai independen dan kepastian objektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki taraf kepatuhan dalam kaitannya dengan operasi-operasi bisnis IFI, dengan tujuan utama memastikan adanya suatu sistem kontrol internal yang andal dan efektif demi kepatuhan terhadap Syariah.

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang

²⁶ Veithzal Rivai, et.al, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 79.

²⁷ Internasional Shari'ah Academy For Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam Prinsip Dan Operasional*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 971.

menghubungkan perusahaan dengan pihak pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.²⁸

2. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada sektor Perbankan Syariah, seperti juga sektor lainnya adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan aktivitas operasi Bank yang bermanfaat dalam mengambil keputusan. Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.²⁹

Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Syariah (KDPPLKS) paragraph 30, dinyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan Syariah adalah:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip Syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha
- b. Informasi kepatuhan entitas Syariah terhadap prinsip Syariah serta informasi asset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah bila ada dan bagaimana prolehan dan penggunaannya.

²⁸Hery, *Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive Edition* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016), h. 3.

²⁹ Osmad Muthaer, "Akuntansi Perbankan Syariah", Cet-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 26-27.

- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas Syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana.
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas Syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.³⁰

3. Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah

Gambaran kinerja suatu Bank pada umumnya dan pada Bank Syariah pada khususnya, biasanya tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:

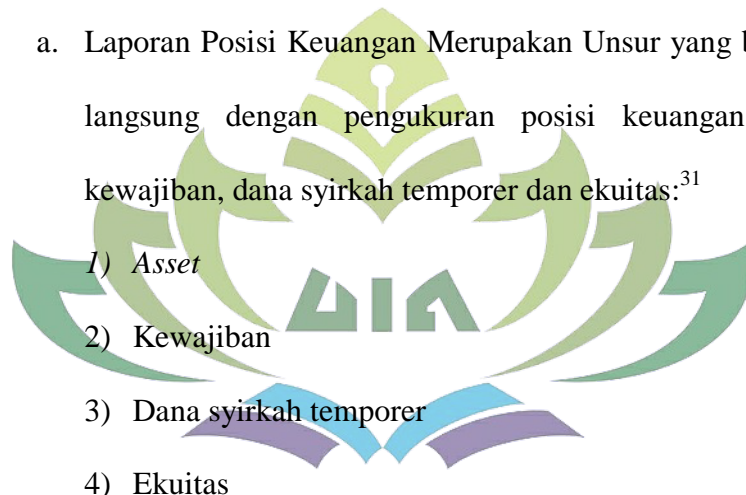
- a. *Shahibul maal*/pemilik dana
- b. Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana

³⁰ *Ibid*, h. 4-5.

- c. Pembayar zakat, infaq dan shodaqoh
- d. Pemegang saham
- e. Otoritas pengawasan
- f. Bank Indonesia
- g. Pemerintah
- h. Lembaga penjamin simpanan
- i. Masyarakat

4. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Bank Syariah

- a. Laporan Posisi Keuangan Merupakan Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah asset, kewajiban, dana syirkah temporer dan ekuitas.³¹



- 1) Asset
- 2) Kewajiban
- 3) Dana syirkah temporer
- 4) Ekuitas

- b. Penyajian Laporan Keuangan Syariah Yaitu Penyajian laporan keuangan Syariah telah diatur dengan pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) dan pedoman akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PABSI). Laporan keuangan Bank Syariah sesuai format umum dengan mengacu pada lampiran PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah:

- 1) Neraca

³¹ Iwan Triyuwanno, *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, Dan Teori*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 675.

- 2) Laporan laba rugi
- 3) Laporan arus kas
- 4) Laporan perubahan ekuitas
- 5) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
- 6) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- 7) Catatan atas laporan keuangan.³²

D. *Office Channeling* (Layanan Syariah)

1. *Pengertian Office Channeling*

Melalui praturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha Bank umum konvensional menjadi Bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah dan pembukaan kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah oleh bank umum konvensional, 30 januari 2006. Maka bank umum konvensional yang telah memiliki UUS dapat menggunakan jaringan kantornya untuk memberikan layanan Syariah, yang dalam istilah perbankan dikenal dengan *Office Chanelling*.³³

Layanan syariah atau *Office Chanelling* adalah kegiatan menghimpun dana, pembiayaan dana pemberian jasa-jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di kantor cabang untuk dan atas nama kantor cabang syariah pada bank yang sama. Dalam peraturan PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang layanan Syariah yang

³² Osmad Muthaher, *Manajemen Akuntansi*, h. 28-30.

³³ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 102-103.

kemudian disebut dengan *Office Channelling*, yaitu perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi Bank Syariah dan pembukaan kantor Syariah oleh Bank konvensional, dengan syarat cabang Bank konvensional ini telah memiliki UUS (Unit usaha Syariah) maka diperbolehkan menerapkan layanan Syariah ini.

Kebijakan *Office Channelling* dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada jasa-jasa perbankan khususnya pada masyarakat-masyarakat yang di daerahnya belum mempunyai Bank Syariah, dengan kebijakan yang menggunakan system ini maka Bank Syariah tidak perlu membuka kantor cabang Syariah baru sehingga bisa lebih meminimalisir biaya yang di keluarkan. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mengarahkan aktivitas Perbankan agar mampu menunjang prekonomian nasional melalui kegiatan Perbankan Syariah.

Indikator kebijakan *Office Channelling* dalam penelitian ini yaitu jumlah kantor cabang layanan Syariah dengan berdasarkan konsep perluasan jaringan yang dioprasikan selama 2014 s/d 2017 pada Bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Menurut pasal 19 ayat (2) undang-undang Perbankan Syariah, kegiatan usaha UUS meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lainnya yang tidak

bertentangan dengan Syariat Islam.³⁴ Dalam konsep perluasan jaringan dikemukakan bahwa tingkat penghimpunan DPK sangat ditentukan oleh banyaknya jaringan operasional Perbankan Syariah.

Jadi, masyarakat dapat menggunakan jasa Perbankan tanpa harus mendatangi BUS tapi dengan kantor cabang konvensional yang telah memiliki UUS maka masyarakat dapat bertransaksi sesuai Syariah, dengan singkatnya *Office Channeling* adalah nasabah bisa melakukan berbagai transaksi keuangan Syariah dengan jasa Perbankan konvensional.

2. Tujuan *Office Channeling*

Tujuan dikeluarkannya *Office Channeling* adalah dalam rangka mendukung realisasi pencapaian pangsa pasar Perbankan Syariah. Dengan adanya kebijakan *Office Channeling*, dana pihak ketiga yang dihimpun Bank akan semakin meningkat, sehingga dana yang masuk tersebut berputar. Semakin besar dana yang diperoleh Bank maka akan semakin besar pula peranan Bank Syariah terhadap perekonomian Indonesia.³⁵

3. Dasar Hukum *Office Channeling*

Adanya ketentuan tentang kebijakan layanan Syariah atau *Office Channeling* tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia no.8/3/2006

³⁴ PBI No. 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional

³⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 205.

pasal 38 dan 39 dimana Bank konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) diperbolehkan membuka layanan Syariah. Dasar hukum *Office Channeling* bukan hanya terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No.8/3/2006 tetapi operasional *Office Channeling* juga didasarkan pada Fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia) tentang bunga (*interest/fa'idah*) pasal 3 angka 2 yang menyatakan: “untuk wilayah yang belum ada kantor cabang atau jaringan lembaga keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan melakukan kegiatan transaksi dilembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurot/bajat*”.³⁶

Dalam rangka akselerasi pencapaian target *market share* Bank Syariah, Bank Indonesia sejak tahun 2006 lalu mengeluarkan kebijakan baru bagi industri Perbankan Syariah, harapannya dengan diterapkannya kebijakan ini maka akan membantu pertumbuhan Perbankan semakin baik dimasa yang akan datang, dimana poin pentingnya adalah dapat memberikan pertumbuhan yang positif bagi dana pihak ketiga di Perbankan Syariah.

4. Kelebihan dan Kekurangan *Office Channeling*

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/2006 tentang perubahan kegiatan Bank Umum Konvensional menjadi Bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah. Peraturan kegiatan bank ini telah lebih dulu dibahas dalam undang-

³⁶ Fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia), No. 1 Tahun 2004, tentang Bunga (*interest/Faid'ah*).

undang No.10 Tahun 1998 yang kemudian didukung PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah.

Penerapan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini merupakan salah satu cara pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan kesempatan untuk pengembangan atau perluasan jaringan Perbankan Syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh Bank konvensional. Maka dapat disimpulkan, bank konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Landasan dan kepastian hukum yang kuat bagi yang menjalankan bisnis serta masyarakat luas meliputi sebagai berikut:

- a. Pengatauran aspek dan kelembagaan dan kegiatan usaha Bank Syariah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Pasal tersebut menerangkan, bahwa bank umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah atau melakukan dua kegiatan tersebut dalam 1 perusahaan. Dalam hal ini Bank umum melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuat satuan kerja dan kantor cabang khusus, yaitu Unit Usaha Syariah (UUS) dan kantor cabang Syariah.

b. Bank umum Konvensional yang akan membuka kantor cabang Syariah wajib melaksanakan:

- 1) Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS)
- 2) Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)
- 3) Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh Bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat kita gunakan untuk melakukan pembayaran biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan kegiatan operasional Kantor Cabang Syariah.

Tanggal 30 Januari 2006, Bank Indonesia menetapkan peraturan baru tentang Perubahan Kegiatan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah dan pembukaan kantor Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, yakni PBI No. 8/3/2006. Dengan ditetapkannya peraturan ini maka pengembangan jaringan Perbankan di Indonesia menjadi lebih luas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal baru yang diatur dalam PBI No. 8/3/2006 tentang pengembangan jaringan Perbankan Syariah di Indonesia adalah adanya mekanisme layanan syariah (*Office Channeling*). Layanan Syariah adalah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan kantor cabang. Hal ini berarti PBI telah memberikan

kemungkinan layanan penghimpunan dana yang dilakukan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Pada tanggal 16 juli 2008, PBI ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan layanan Syariah tersebut adalah:

- 1) Rencana layanan Syariah wajib dicantumkan dalam rencan bisnis bank yang telah mendapat penegasan dari Bank Indonesia.
- 2) Layanan Syariah dapat dibuka:
 - a) Dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia dengan kantor cabang Syariah induknya.
 - b) Dengan menggunakan pola kerja sama antara kantor cabang syariah induknya dengan kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu
 - c) Dengan menggunakan sumber daya manusia sendiri bank yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan oprasional Bank Syariah.
- 3) Layanan Syariah wajib:
 - a) Memiliki pencatatan dan pembukuan yang terpisah dari kantor cabang atau kantor cabang pembantu.
 - b) Menggunakan standar akuntansi yang berlaku bagi Perbankan Syariah

- c) Melaporkan keuangan layanan Syariah dengan menggabungkan laporan keuangan kantor cabang Syariah induknya pada hari yang sama.

Pada kebijakan layanan syariah ini juga terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang tak dapat dihindari. Adapun kelebihan dan kekurangan *Office Channeling* terdapat pada table sebagai berikut table 2.1:

Table 2.1
Kelebihan dan kekurangan *Office Channeling*

No	Kelebihan	Kekurangan
1	Bank syariah leluasa berkembang dan memiliki persaingan ketat dengan bank konvensional	Modal tergantung komitmen bank induk. Jika menguntungkan, modal ditambah, tetapi, jika kurang prospek, keberadaannya hanya sekedar mengikuti tren
2	Kemurnian syariah tetap bisa dijaga dengan pemisahan dua pintu	Industri perbankan di Indonesia mayoritas masih di pegang oleh bank konvensional
3	Keberadaannya tersebar di mana-mana karena jumlah kantor layanan besar, sehingga memudahkan untuk berkembang lebih luas	

Sumber: Riani Afiati Mufidah (2006)

5. *Office channeling* Dalam Perspektif Islam

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dan masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan maupun

meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Dalam Bank Syari'ah, pihak pemberi modal dan peminjam menanggung bersama resiko laba ataupun rugi. Hal ini membuat kekayaan tidak hanya beredar pada satu golongan, akan tetapi terjadi proses penyebaran modal yang pada akhirnya terwujud pemerataan keuntungan.

Dalam Islam makna *syirkah* (kerjasama) berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau percampuran). Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.³⁷ Dalam bisnis Syariah, kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Kerjasama dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang dianjurkan dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan, Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan.

³⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah, Cet-1* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 99.

Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan ijab dan qabul maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara rela sama rela. Dalam Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama akan menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil, karena dalam suatu usaha ada kemungkinan tidak untung atau bahkan bisa rugi. Jadi, apabila seseorang telah merelakan uangnya untuk *syirkah* (investasi dalam usaha bersama) dengan orang lain, maka dia harus berani menanggung segala resiko.

Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam kerjasama (*syirkah*) agar dapat tercapainya keuntungan (profit) sesuai dengan persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati. Adapun dasar Hukum Syirkah adalah: (Qs. Shad: 24)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۚ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya

kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

E. Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana Bank adalah usaha Bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana itu tergantung dari Bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lain.³⁸

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila Bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar. Adapun pencairan dana yang dimaksud adalah.³⁹

- a. Setoran modal dari pemegang saham
- b. Cadangan laba yaitu laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan.
- c. Laba Bank yang belum dibagi merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan para pemegang saham.

Keuntungan dari dana sendiri ini adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar dari pada jika meminjam ke lembaga

³⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 45.

³⁹ *Ibid*, h. 46

lain. Sedangkan untuk kerugiannya adalah harus melalui berbagai prosedur yang relatif lama.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai dengan sumber dana ini.

- a. Simpanan Giro
- b. Simpanan tabungan
- c. Simpanan deposito

3. Dana yang bersumber dari lembaga lain

Sumber dana dari lembaga ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Perolehan dana dari sumber ini adalah:

- a. Bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kredit yang diberikan bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan.
- b. Pinjaman antar Bank (*call money*)
- c. Pinjaman dari Bank-bank luar negeri
- d. Surat berharga pasar uang (SBPU)

F. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat luas dimana dana ini sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai

operasionalnya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Pentingnya sumber dana dari masyarakat ini dikarenakan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana utama bagi bank, Sumber dana ini juga disebut sumber dana pihak ketiga.⁴⁰

Bagi Bank Konvensional, selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk “menahan” uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan: Transaksi, cadangan (jaga-jaga), dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan danapun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.⁴¹

Lalu bagaimana proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh Perbankan Syariah. Pada prinsipnya hampir sama dengan Perbankan konvensional, artinya dalam sistem Perbankan Syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa pada sistem Perbankan Syariah tidak dikenalkan adanya sistem bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah. dengan demikian, produk penghimpunan dana (*funding*) yang ada dalam sistem

⁴⁰ *Ibid*, h. 31.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, “*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*”, Cet-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 146.

Perbankan Syariah terdiri dari (1) Giro: Giro *wadi'ah* dan Giro *Mudharabah*, (2) Tabungan: Tabungan *wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah*; (3) Deposito: Deposito *Mudharabah*⁴². Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang di tawarkan dunia perbankan. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.⁴³

1. Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/*bilyet* giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan Bank Syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainnya. Dalam aplikasinya ada giro *wadi'ah* yang memberikan bonus dan ada yang tidak memberikan bonus.⁴⁴ Pengertian giro ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni simpanan simpanan akad berdasarkan *wadi'ah*.

Giro yang dikenal dalam Perbankan Syariah dengan menghilangkan unsur bunga yang ada di dalamnya. Kemudian muncul pertanyaan, prinsip apa dalam islam yang cocok dipakai dalam produk

⁴² Khotibul Umam Dan Setawan Budi Utomo, "*Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya di Diindonesia*", Cet-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 79.

⁴³ Djoni s Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 215.

⁴⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 114.

giro dan keuntungan apa yang akan diperoleh oleh nasabah apabila memilih produk giro selain mendapatkan kemudahan dalam lalu lintas pembayaran. Jawabannya terdapat akad Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ada dua macam, yaitu bisa menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah*).⁴⁵ Dalam konsepnya *wadi'ah* terbagi menjadi dua yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad ad-dhamanah*. Dalam konsep *wadi'ah yad amanah* pihak yang menerima tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta yang dititipkan akan tetapi dapat membebankannya biaya kepada pihak yang menitip sebagai biaya penitipan.⁴⁶

a) Landasan Hukum Giro *Wadi'ah* dalam Praktek Perbankan Syariah

1) Al-Qur'an

Ketentuan Al-Qur'an mengenai prinsip *wadi'ah* ini dapat kita temui dalam bacaan Surat An-Nisa [2]:58 yang artinya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁴⁵ *Ibid*, h. 80-81.

⁴⁶ Nurul Ihsan Hasan, “Perbankan Syariah Sebuah Pengantar” (GP Press Group, 2014), h. 202-203.

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (An-Nissa:58)*

2) Hadis

Ketentuan hadis mengenai prinsip wadi'ah ini dapat dibaca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَّنَ إِلَى مَنْ أَيْمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu

3) Ijma'

Bahwa telah terjadi ijma' dari para ulama terhadap legitimasi wadi'ah mengingat kebutuhan manusia mengenai hal ini sudah jelas terlihat.

b) Landasan Hukum Positif

Giro wadi'ah sebagai salah satu produk Perbankan dibidang penghimpunan dana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 1992 tentang Perbankan. Untuk saat ini dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka dasar hukum yang mendasari giro

wadi'ah adalah undang-undang yang dimaksud. Giro *wadi'ah* sebagai salah satu produk penghimpun dana yang mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2009 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pemberian jasa-jasa sebagaimana telah diubah dalam PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan bahwa antara lain pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Giro juga diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN MUI/IV/2000 yang intinya menyatakan bahwa giro yang dibenarkan oleh Syariah adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁴⁷

2. Tabungan Syariah (*saving Deposito*)

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepskati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/*bilyet* giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Akad yang digunakan adalah transaksi penitipan dana atau barang yang dimiliki kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Selanjutnya akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari

⁴⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, h. 82-83.

pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai Syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

a) Landasan Hukum Tabungan Wadi'ah Dan Mudharabah Dalam Praktek Perbankan Syariah

1) Al-Qur'an

Ketentuan hukum tentang mudharabah ada dalam Al-Qur'an tertuang dalam Surat Muzzamil {73}: 20 yang artinya:



2) Hadis

Ketentuan dalam hadis dapat dijumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh thabrani yang artinya:

“Diriwayatkan dari ibnu abbas bahwa Syayidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra secara mudharabah ia menyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada rasulullah saw. Dan rasulullah membolehkannya.”

Dari hadis diatas menunjukan bahwa dalam *mudharabah* pihak *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% akan

menanggung resiko kehilangan modal sehingga pihak mudharib selaku pengelola dana harus benar-benar hati-hati dan selalu melaksanakan akad *mudharabah* dengan iktikad baik.

3) Ijma'

Telah dicapai kesepakatan terhadap akad mudharabah ini dikalangan ulama, bahkan sejak para sahabat.

b) Fitur dan Mekanisme

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana
- 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dll.
- 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah
- 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

3. Deposito (*Time Deposit*)

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antar nasabah dengan bank. Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul*

maal) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan prinsip Syariah, dengan pembagian hasil usaha antara dua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Landasan Hukum Deposito, Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat dijumpai dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas. Deposito sebagai salah satu produk penghimpun dana juga mendapat dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa investasi, memerlukan jasa Perbankan. Berdasarkan fatwa DSN-MUI deposito yang dibenarkan secara Syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

4. Pengumpulan Harta Melalui Zakat, Infaq dan Shodaqoh

a. Pengumpulan

- 1) Badan/amil zakat dalam mengumpulkan dana zakat dari muzakki baik perorangan maupun badan, dapat dilakukan

secara langsung oleh badan pengumpulan atau Unit pengumpulan Zakat.⁴⁸

- 2) Badan/Lembaga Amil Zakat wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima.
- 3) Bukti setoran zakat yang sah tersebut harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat atau nomor lengkap pengukuhan Lembaga Amil Zakat.
 - b) Nomor urut bukti setoran.
 - c) Nama, alamat muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWP) apabila zakat penghasilan yang di bayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak Pajak penghasilan.
 - d) Tandatangan, nama, jabatan petugas, tanggal penerimaan, dan stempel Badan/Lembaga Amil Zakat.
- 4) Bukti setoran zakat yang sah tersebut dibuat rangkap tiga, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Lembar 1 (asli), diberikan kepada muzakki yang dapat di gunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak Pajak Penghasilan.

⁴⁸ Tulus, *Pedoman Zakat* (Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dapertemen Agama RI, 2006), h. 294.

- b) Lembar 2 (asli), diberikan kepada Badan/ Lembaga Amil Zakat sebagai arsip.
- c) Lembar 3, digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila zakat disetor melalui bank.

b. Penyaluran

- 1) Dana zakat yang telah dikumpulkan wajib disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum islam.
- 2) Penyaluran zakat kepada mustahiq harus bersifat hibah, dan harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq diwilayah masing-masing.
- 3) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan sesaat.
- 4) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan.

c. Pemberdayaan

- 1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Hasil pendanaan dana penelitian mustahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.
 - b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.

- 2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Apabila pendayagunaan untuk mustahiq delapan asnaf sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
 - b) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
 - c) Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.
- 3) Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Melakukan studi kelayakan
 - b) Menentukan jenis usaha produktif
 - c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
 - d) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
 - e) Membuat laporan.⁴⁹

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfi Rachma dengan judul penelitian “Pengaruh CAR, FDR dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Syariah Setelah diterapkannya Kebijakan *Office Channeling* dan *Spin Off* Periode 2011-2015”.⁵⁰ Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 8 Bank yang telah menerapkan kebijakan *Office Channeling* dan

⁴⁹ *Ibid*, h. 296.

⁵⁰ Alif Rachma, “ *Pengaruh CAR, FDR dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Setelah Diterapkannya Kebijakan Sistem Office Channeling dan Spin Off Periode 2011-2015*” (Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

spin off. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan ketentuan bank tersebut mempublikasikan Laporan Keuangan selama periode penelitian yang akan digunakan. Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode regresi linear berganda yaitu data panel menggunakan aplikasi Eviews 8. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel CAR, FDR dan BOPO berpengaruh terhadap ROA, hal ini berarti menunjukkan secara simultan kebijakan *Office Channeling* dan *spin off* berpengaruh terhadap profitabilitas Perbankan Syariah, namun secara parsial hanya variabel BOPO yang berpengaruh terhadap ROA namun dengan arah yang negatif.

Penelitian lain dilakukan oleh Teti Rahmawati.⁵¹ Dengan judul “Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Sebelum dan Sesudah Penerapan Kebijakan *Office Channeling*”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan data skunder. Data diperoleh dari laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan Bank Syariah 2004-2014. Adapun penentuan sampel dari penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Dengan menggunakan uji T-test dalam penelitian ini atau *parametric paired* digunakan untuk mengetahui indikator uji t sampel berpasangan. Hasil dari peneliti ini adalah bahwa terdapat perbedaan rata-rata kuantitas penghimpunan dana pihak ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia sebelum dan sesudah penerapan

⁵¹ Teti Rahmawati, “Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Kebijakan *office channeling*”, JRKA Vol. 1 No. 2 (2015), h. 87.

kebijakan *Office Channeling*. Pada pengujian hipotesis juga terdapat pengaruh yang signifikan dari kebijakan *Office Channeling* terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada Perbankan Syariah Indonesia.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Moch. Edman Syarief Dan M. Muflih Yang berjudul, “Komparasi Produktifitas Penghimpunan DPK pada UUS dan BUS Pasca Kebijakan *Office Channeling*”. Dari populasi bank yang menerapkan kebijakan *Office Channeling* maka terdapat 10 bank yang menjadi sampel pada penelitian ini, yang terdiri 5 BUS dan 5 sampel UUS. Penelitian ini menggunakan dua metode yakni analisis data deskriptif dan analisis data inferensi, pada metode analisis deskriptif menggunakan uji statistik deskriptif sedangkan metode inferensi menggunakan dua macam alat pengujian yaitu, analisis uji regresi dan beda untuk dua sampel independen, yang mana hasilnya terdapat perbedaan yang signifikan dalam penghimpunan DPK pada BUS dan UUS pasca kebijakan *Office Channeling* yang diterapkan oleh bank Indonesia.⁵² Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jumlah jaringan operasional layanan syariah, dalam hal ini adalah jaringan bank umum syariah dan jaringan unit usaha syariah mempengaruhi produktifitas penghimpunan dana pihak ketiga pada BUS dan UUS dan berpengaruh juga pada peningkatan laba. Terdapat perbedaan yang signifikan juga dalam penghimpunan dana pihak ketiga pada BUS dan UUS pasca kebijakan *Office Channeling* yang diterapkan oleh bank Indonesia. Menurut hasil perhitungan, produktifitas

⁵² Moch. Edman Syarief, M. Muflih, “ Komparasi Produktifitas Penghimpunan DPK Pada UUS Dan BUS Pasca Kebijakan *Office Channeling* Di Indonesia”, *Jurnal Keuangan Syariah*, (2011), h. 28.

bank umum syariah masih lebih baik dibandingkan dengan produktifitas unit usaha syariah.

Penelitian lain yang di lakukan Triyani Yang berjudul, “pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) dan *Office Channeling* terhadap profitabilitas unit usaha syariah periode 2015-2017”. Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Perbankan Syariah triwulan pada Unit Usaha Syariah (UUS) periode Januari 2015-Desember 2017. Metode dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan data panel yang diolah menggunakan SPSS. Teknik analisis data menggunakan Uji T-test yang mana untuk melihat hubungan secara parsial pada variabel tersebut. Kemudian menggunakan Uji F untuk melihat hubungan secara simultan atau secara keseluruhan dalam suatu variabel penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan koefisien regresi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Maka akan diikuti kenaikan tingkat laba atau profitabilitasnya.

Hal ini dikarenakan dana pihak ketiganya tinggi maka penyaluran pembiayaan juga tinggi, sehingga laba atau profit yang dihasilkan semakin meningkat Berdasarkan koefisien regresi *Office Channeling* secara parsial

berpengaruh positif terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah. Dengan demikian semakin tinggi *Office Channeling* maka akan diikuti kenaikan profitabilitas. Oleh karena itu, H2 yang menyatakan bahwa *Office Channeling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah diterima. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah kantor cabang maka laba atau profit yang dihasilkan semakin meningkat.⁵³

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Siti Chotifah yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Nasabah Tentang *Office Channeling* Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi Pada Nasabah BRI Kartasura)”, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang mencakup (metode sampling, metode analisis data, metode pengujian hipotesis, dan metode perkiraan. Dimana pengetahuan nasabah tentang *Office Channeling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah pada nasabah BRI Kartasura, yang mana dinyatakan dengan uji t variabel pengetahuan terhadap minat menabung dengan nilai (2,546) dimana nilai signifikan $0,00 < 0,05$.⁵⁴

Perbedaan penelitian sekarang dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel dependennya atau pada sasaran yang akan dibahas dalam penelitiannya, dimana penelitian yang sekarang terfokus pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga periode berjalan dan

⁵³ Triyani, “Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Office Chenelling Terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah Priode 2015-2017”. (Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Lampung, Bandar Lampung, 2017)

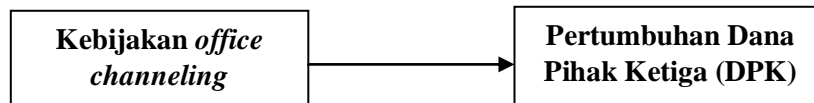
⁵⁴ Yuliana Siti Chotimah, “Pengaruh Pengetahuan Nasabah Tentang *office chenelling* Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah BRI Kartasura”, *Jurnal Perbankan Syariah*, (2017), h. 70.

kesesuaian penerapan kebijakan *Office Channeling* bagi bank-bank yang bersangkutan, objek penelitian, populasi, sampel dan tahun penelitian atau jangka periode juga berbeda dengan tahun sebelumnya. Yang akan diteliti pada penelitian ini, periode yang digunakan yaitu dari tahun 2014-2017.

H. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu kebijakan *Office Channeling* terhadap Pertumbuhan dan pihak ketiga (DPK). Suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sudah pasti mempunyai tujuan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas bank. Salah satu tujuan kebijakan *Office Channeling* adalah dapat meningkatkan pangsa pasar pada Perbankan Syariah. Jika kebijakan *Office Channeling* ini di terapkan dengan baik dan sesuai dengan peraturan PBI/8/3/2006 maka seharusnya dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga, Pada Perbankan Syariah. Kebijakan ini juga dapat dilihat dari sisi perluasan jaringan atau banyaknya jumlah kantor layanan Syariah.

Berdasarkan dukungan dari landasan teori dan hubungan variabel yang telah dikemukakan sebelumnya dengan tujuan penelitian di atas, mengenai pengaruh kebijakan *Office Channeling* terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada perbankan di Indonesia periode 2014-2017, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

I. Hubungan Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dalam penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁵⁵

Pengaruh kebijakan *Office Channeling* Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional, 30 januari 2006. Maka bank umum konvensional yang telah memiliki UUS dapat menggunakan jaringan

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 63.

kantornya untuk memberikan layanan Syariah, yang dalam istilah Perbankan dikenal dengan *Office Channeling*.

Indikator kebijakan *Office Channeling* dalam penelitian ini yaitu jumlah kantor cabang layanan Syariah dengan berdasarkan konsep perluasan jaringan yang dioprasikan selama 2014 s/d 2017 pada Bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Menurut pasal 19 ayat (2) undang-undang Perbankan Syariah, kegiatan usaha UUS meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang bersumber dari masyarakat luas baik berupa giro, tabungan dan deposito. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan/kemampuan suatu bank untuk membiayai oprasinya.

Setelah BI mengeluarkan kebijakan Perbankan PBI No. 8/3/PBI/2006 pada tanggal 30 januari 2006, bank umum dapat membuka layanan Syariah pada kantor-kantor cabangnya (*Office Channeling*) yang sebelumnya dengan undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 bank umum hanya diperbolehkan memberikan layanan syariah pada kantor cabang syariahnya saja.

Tenny Badina, Ina Indriana dan Yeni Jnuarsi, menyatakan setelah diberlakukannya kebijakan *Office Channeling*. Jumlah dana pihak ketiga

(DPK) yang berhasil dihimpun oleh rata-rata UUS naik menjadi 11,6% dari 59,6% pada akhir tahun 2006 menjadi 71,2% pada akhir tahun 2007, ini menunjukkan adanya hubungan sangat kuat artinya setiap pembukaan atau penambahan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun akan bertambah dengan bertambahnya jumlah unit layanan Syariah. Namun kenaikan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh UUS masih relatif kecil dan tidak memberikan banyak kontribusi pada meningkatnya pangsa pasar Perbankan Syariah pada akhir tahun 2007. Dan masih sangat didominasi oleh Bank Umum Syariah (BUS).

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Moch. Edman Syarif dan M. Muflih, yakni komparasi produktifitas penghimpunan dana pihak ketiga yang dilakukan pada BUS dan UUS. Menyatakan bahwa jumlah jaringan oprasional layanan syariah, berpengaruh terhadap penghimpunan dana pihak ketiga, dalam hal ini adalah jaringan Bank umum syariah dan jaringan Unit Usaha Syariah pada BUS Dan UUS dan berpengaruh juga pada peningkatan laba. Dalam konsep perluasan jaringan dikemukakan bahwa tingkat penghimpunan DPK sangat ditentukan oleh banyaknya jaringan operasional Perbankan Syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Triyani pada tahun 2015-2017, menyatakan bahwa kebijakan *Office Channeling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah kantor cabang maka laba atau profit yang dihasilkan semakin meningkat. Implikasi dari penelitian ini dilihat

dari sisi konsep perluasan jaringan atau banyaknya jumlah kantor cabang layanan Syariah. Dimana dengan diterapkannya kebijakan *Office Channeling* berarti jaringan layanan Syariah di Indonesia akan semakin banyak dan semakin luas, hal ini akan berdampak pada kemudahan akses masyarakat dalam menggunakan jasa Perbankan Syariah. Semakin tinggi dana pihak ketiga yang diperoleh maka penyaluran pembiayaan juga tinggi sehingga laba atau profit yang dihasilkan juga semakin meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti di atas serta adanya kebijakan *Office Channeling* yang memperluas jaringan operasional Perbankan Syariah melalui PBI No. 8/3/PBI/2006 yang menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis ini. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

Ha: Terdapat Pengaruh kebijakan *Office Channeling* terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Desain Penelitian

Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model atau *blue print* penelitian.⁵⁶

Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang di laksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁵⁷

Penelitian ini bersifat *asosiatif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih.

⁵⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 71.

⁵⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), h. 97.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang di jadikan bahan dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan penelitian kemudian data yang di peroleh dari kantor, buku (kepuustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian.⁵⁸ Data di peroleh dari laporan keuangan yang di publikasikan oleh *website* resmi yang kemudian diambil dan di olah dari *website* BI atau www.bi.go.id, www.bps.go.id, Dan dari www.ojk.go.id periode tahun 2014-2017.

C. Populasi Dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Unit Usaha Syariah yang di publikasikan oleh *website* resmi. Objek dan populasi diteliti, hasilnya di analisis, disimpulkan, dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh popu lasi.⁵⁹ Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah Statistik Perbankan Syariah Tahunan pada Unit Usaha Syariah (UUS) periode 2014 sampai 2017 sebanyak 21 bank Bank Umum Konvensional yang menerapkan kebijakan *Office Channeling*.

⁵⁸ Moh. Pabunda, Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 58.

⁵⁹ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (edisi revisi, cet. 14), PT Rineka Cipta, 2010, h. 174.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi.⁶⁰ Teknik pengambilan sampling secara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan memilih subyek berdasarkan kriteria spesifikasi yang ditetapkan peneliti atau berdasarkan pertimbangan khusus. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Unit Usaha Syariah, yakni Laporan keuangan Tahunan yang di publikasikan di *website* Bank Indonesia (BI) yang diambil dari data time series (Runtun waktu) sebanyak tahun 2014-2017. Dan terdapat 9 Bank Umum Konvensional yang menerapkan kebijakan *Office Channeling* yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun kriteria sampel yang diambil dalam objek penelitian ini adalah:

- a. Kelengkapan data laporan keuangan yang di publikasikan bank periode 2014-2017 secara berurutan.
- b. Banyaknya jumlah kantor cabang Unit Usaha Syariah, yang menerapkan kebijakan *Office Channeling*.
- c. Banyaknya jumlah Dana Pihak Ketiga yang mampu dihimpun oleh bank yang menerapkan kebijakan *Office Channeling*.

⁶⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 115.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai pencatatan peristiwa sebagian atau keseluruhan elemen populasi penelitian. Dalam hal ini cara pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu penelusuran *literature*. Penelusuran *literature* adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya. Penelusuran *literature* disebut juga pengamatan tidak langsung.⁶¹ Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan penelitian adalah:

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Library research yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari membaca literature, buku, artikel, jurnal dan sejenisnya yang berhubungan dengan penelitian.

2. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah cara pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi seperti laporan keuangan, dokumentasi yang dimiliki oleh perusahaan, buku tentang teori, jurnal, dan pendapat yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik dokumenter atau juga dokumentasi.⁶² Data dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk data yang telah dikumpulkan, diolah dan dipublikasikan oleh pihak lain yaitu Bank

⁶¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 23.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 29.

Indonesia (BI) www.bi.go.id Dan Otoritas Jasa Keuangan www.ojk.go.id (OJK).

E. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel. Variabel pertama merupakan variabel independen yaitu kebijakan *Office Channeling*, variabel kedua adalah variabel dependen adalah pertumbuhan dana pihak ketiga.

1. Variabel Bebas (X) Independen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, Atecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kebijakan *Office Channeling* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2014-2017.

kebijakan *Office Channeling* diarahkan agar mampu meningkatkan pangsa pasar Perbankan Syariah secara nasional, dengan diukur pada pertumbuhan dana pihak ketiga yang telah dicapai oleh Bank-bank yang menerapkan kebijakan *Office Channeling*.

2. Variabel Terikat (Y) (Variabel Dependen)

Variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel

terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.⁶³

Dalam penelitian ini yang menjadi objek variabel terikat yang digunakan yaitu Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada bank yang menerapkan kebijakan *Office Channeling*. Dana Pihak Ketiga dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$DPK = \left(\frac{\text{Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total Kewajiban}} \right) \times 100\%$$

F. Definisi Oprasional Variabel

Difinisi oprasional variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dijelaskan pada table berikut:

Table 1.2
Definisi Oprasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kebijakan <i>Office Channeling</i> (X)	<i>Office channeling</i> adalah kegiatan menghimpun dana, pembiayaan dana pemberian jasa-jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di kantor cabang.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kantor cabang 	Nominal
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) (Y)	Dana pihak Ketiga Adalah simpanan dana yang di percaya oleh nasabah kepada bank syariah atau UUS berdasarkan akad Wadi'ah atau akad lain dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Rupiah (Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga) 	Rasio (%)

⁶³ *Ibid.* h. 3.

G. Metode Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah secara statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana yang perhitungan menggunakan micro soft excel merupakan aplikasi untuk mengolah data berupa perhitungan dasar, rumus pemakaian fungsi-fungsi pengolahan data dan table pembuat grafik dan manajemen data, regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh independen terhadap dependen.⁶⁴

1. Uji Normalitas

Uji normalitas sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal.⁶⁵ Salah satu untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidaknya adalah dengan uji statistik, yaitu uji statistik non-parametrik *kolmogorov-smirnov* (k-5). Dengan taraf signifikan 0.05, data

⁶⁴ Ety Rochaeli dkk, *Metode Penelitian Bisnis Dengan Aplikasi SPSS* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), h. 104.

⁶⁵ Bhuono Agung Nugroho, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*, (C.V Andi Offset, 2005), h. 18.

dinyatakan berdistribusi normal jika signifikan lebih besar dari 5%, untuk pengambilan keputusan dengan pedoman:⁶⁶

1. Nilai signifikan atau nilai probabilitas $<0,05$, distribusi data tidak normal.
2. Nilai signifikan atau nilai probabilitas $>0,05$, distribusi data adalah normal

2. Uji Hipotesis

a. Regresi Linear Sederhana

Regresi bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan atau pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel bergantung atau dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau variabel independen. Regresi yang memiliki satu variabel dependen dan satu variabel independen disebut regresi sederhana. Berikut adalah penjelasan variabel bebas dan terikat yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu:

Variabel bebas (X) : Kebijakan *Office Channeling*

Variabel terikat (Y) : Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Maka dalam penelitian ini akan di lihat seberapa besar pengaruh kebijakan *Office Channeling* (X) Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada perbankan di Indonesia. Rumus untuk regresi linear sederhana adalah:

⁶⁶ *Ibid*, h. 154.

$$a = \frac{[(\sum Y) (\sum x^2)] - [(\sum x)(\sum xy)]}{[n(\sum x^2) - (\sum x)^2]}$$

$$b = \frac{[n(\sum xy)] - [(\sum x)(\sum y)]}{[n(\sum x^2) - (\sum x)^2]}$$

$$Y = a + b (X)$$

Keterangan:

a: Konstants

b: koefesien

X: Variabel Bebas (*Kebijakan Office Channeling*)

Y: Variabel terikat (*Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga*)

b. Uji Signifikansi Parametrik Individual (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji dilaksanakan dengan langkah membandingkan t hitung dengan t table. Untuk menentukan nilai t hitung dapat digunakan rumus $\frac{b}{sb}$ dimana b: koefisien regresi, sb: standar error dari variabel independen. Dimana b: koefisien regresi, sb: standar error dari variabel independen α . Penguji dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi α (0,05). Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai $\text{sig} < 0,5$ maka H_0 ditolak, H_a diterima
- b) Jika nilai $\text{sig} > 0,05$ maka H_0 diterima, H_a ditolak

c. Uji Koefisien Determinasi (r^2)

Koefisien determinasi (r^2) digunakan untuk menentukan seberapa besar variabel dependen (Y) yang dapat di jelaskan oleh nilai koefisien determinasi adalah $0 < r^2 < 1$.⁶⁷ jika nilai r^2 berkisaran hampir satu, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dan sebaliknya jika nilai r^2 semakin mendekati angka nol, berarti semakin lemah kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dalam realita nilai r^2 tidak mungkin 1 atau 100% tetapi sekali dibawah 1 atau 100%. Rumus Koefisien

Determinan r^2 :

$$r = \frac{n \sum x \sum y - \sum x \sum y}{\sqrt{(n(\sum x^2) - (\sum x)^2)[n(\sum y^2) - (\sum y)^2]}}$$

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 75.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal.⁶⁸ Salah satu untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidaknya adalah dengan uji statistik, yaitu uji statistik non-parametik *kolmogorof-smirnov* (k-5). Dengan taraf signifikan 0.05, data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikan lebih besar dari 5%, untuk pengambilan keputusan dengan pedoman:

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas

Sampel	Signifikansi	Keterangan
36	0,152	Normal

Sumber: Data Di Olah

Berdasarkan hasil uji normalitas dimana uji ini digunakan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak, maka dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi yaitu sebesar $0,152 > 0,005$ hal ini menunjukkan bahwa $0,152$ lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada data tersebut berdistribusi normal.

⁶⁸ *Ibid*, h. 18.

B. Uji Hipotesis

1. Regresi Linear Sederhana

Pengaruh Kebijakan *Office Channeling* Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga di Perbankan Syariah dapat dilihat dari analisis regresi sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah sebuah teknik yang bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel yang dipengaruhi adalah variabel bergantung atau (dependen), sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau (independen). Regresi yang memiliki satu variabel dependen dan satu variabel independen disebut regresi sederhana. Adapun hasil analisis dengan menggunakan regresi sederhana dapat dilihat pada table 4.2 berikut ini:

Table 4.2
Hasil Uji Regresi Sederhana dan Persamaan Regresi

Variabl	Prediksi	Koefisien	t-statistic	Signifikan	Keterangan
Constant		-1301,485	-1,435	0,160	
DPK					
OC	Positif	85,195	4,574	0,000	Diterima
F- Hitung		=20,919			
Signifikansi		=0,000			
R		=0,617			
R Square		=0,381			

Sumber: Data Di Olah

Hasil analisis regresi sederhana dapat dilihat pada table 4.2. berdasarkan hasil analisis regresi yang tertera pada table 4.2 maka diperoleh persamaan model regresi yaitu:

$$a = \frac{[(\sum Y)(\sum x^2)] - [(\sum x)(\sum xy)]}{[n(\sum x^2) - (\sum x)^2]}$$

$$= 85,195$$

$$b = \frac{[n(\sum xy)] - [(\sum x)(\sum y)]}{[n(\sum x^2) - (\sum x)^2]}$$

$$= -1301,485$$

$$Y = a + b (X)$$

$$\text{DPK} = -1301,485 + 85,195 * \text{OC}$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa nilai *constant* sebesar 1301,485 sedangkan secara berurutan untuk variabel *Office Channeling* sebesar 85,195 berdasarkan persamaan diatas, maka pengaruh variabel independen terhadap dana pihak ketiga dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Hasil uji regresi menunjukkan nilai konstanta (α) sebesar -1301,485 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel dana pihak ketiga adalah sebesar -1301,485. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketika variabel independen yaitu *office channeling* dianggap konstan, maka variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) bernilai -1301,485.
- b. Koefisien regresi X atau *Office Channeling* sebesar 85,195 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai *Office Channeling*, maka nilai dana pihak ketiga bertambah sebesar

85,195. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Artinya jika terjadi penambahan nilai *Office Channeling* sebesar 1% maka volume (DPK) akan meningkat atau bertambah sebesar 85,195.

2. Uji Koefisien Determinasi (r^2)

koefisien determinasi (r^2) digunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan variabel bebas (X). jika r^2 semakin besar, maka presentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin tinggi. Jika r^2 semakin kecil, maka presentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin rendah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan nilai *R square* untuk mengetahui besarnya variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen. Maka dapat dijelaskan pada table 4.3:

Tabel 4.3
Hasil Uji Determinasi (r^2)

Model	R	R Square
1	0,617	0,381

Sumber: Data di Olah

$$\frac{n \sum x \sum y - \sum x \sum y}{\sqrt{(n(\sum x^2) - (\sum x)^2)[n(\sum y^2) - (\sum y)^2]}}$$

$$r = 0,617$$

$$r^2 = 0,381$$

Berdasarkan hasil uji determinasi pada table 4.3 diperoleh nilai *R square* atau r^2 sebesar 0,381. Hal ini berarti 38,1% variabel dependen yaitu pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu kebijakan *Office Channeling* (OC), sedangkan sisianya ($100\% - 38,1\% = 61,9\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Dapat disimpulkan pula dari hasil analisis koefisien determinasi yaitu mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (*Office Channeling*) terhadap variabel terikat (Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga) adalah sebesar 38,1%.

3. Uji Signifikansi Parametrik Individual (Uji t)

Uji t merupakan pengujian koefisien regresi parsial individu yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara parsial kebijakan *Office Channeling* Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dapat dilihat dari hasil uji t, kriteria pengujiannya apabila nilai probabilitas atau signifikansi kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa H_a diterima. Dari pengujian secara parsial diperoleh hasil output sebagai berikut:

Table 4.4

Hasil Analisis Uji Parametrik Individual (Uji t)

Variabel	Koefisien	t-statistic	Signifikan	Keterangan
Constant	-1301,485	-1,435	0,160	
DPK				
OC	85,195	4,574	0,000	Diterima

Sumber: Data di Olah

Berdasarkan table 4.4 hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel independen yaitu Kebijakan *Office Channeling* yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, dilihat dari masing-masing probabilitasnya menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Berikut penjelasannya dari pengujian variabel secara parsial.

Pengaruh Kebijakan *Office Channeling* Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh kebijakan *Office Channeling* terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada table 4.4 di atas, di peroleh nilai t sebesar 4,574 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut kurang dari nilai $\alpha = 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa variabel kebijakan *Office Channeling* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga. Hipotesis yang diajukan sama dengan hasil penelitian yaitu Kebijakan *Office Channeling* Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga di Perbankan Syariah, maka dapat disimpulkan bahwa Ha Diterima.

C. Pembahasan

Office Channeling atau layanan syariah merupakan kegiatan penghimpun dana yang dilakukan di kantor cabang atau di kantor di bawah kantor cabang untuk dan atas nama kantor cabang syariah pada bank yang sama. *Office channeling* dimaksudkan untuk meningkatkan akses

masyarakat kepada jasa Perbankan Syariah serta untuk meningkatkan pangsa pasar Perbankan Syariah, dengan diterapkannya kebijakan ini bank syariah tidak perlu lagi membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS) dibanyak tempat dalam memberikan layanan Perbankan Syariah, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien dan khususnya lebih memudahkan masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa Perbankan Syariah.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh kebijakan *Office Channeling* terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada table 4.4, diperoleh nilai t untuk variabel *Office Channeling* sebesar 85,195 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, dimana nilai ini menunjukkan bahwa kurang dari $\alpha = 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa variabel *Office Channeling* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga. Hasil hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu kebijakan *Office Channeling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga di Perbankan Syariah Indonesia. Maka dapat disimpulkan H_a Diterima. Dengan meningkatkan *Office Channeling* maka akan diikuti dengan peningkatan terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga.

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan oprasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian sumber

dana ini paling dominan. Perkembangan dana pihak ketiga yang di publikasikan dari Otoritas Jasa Keuangan, tercatat bahwa pada tahun 2015 jumlah dana pihak ketiga yang mampu dikumpulkan oleh Unit Usaha Syariah sebesar 56,28 triliun sampai pada 2017 sebesar 96,49 triliun rupiah dan pangsa pasar yang dicapai sebesar 31,30% total keseluruhan Unit Usaha Syariah yang dicapai pada tahun 2017,. Sedangkan untuk total pencapaian keseluruhan oleh Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 221.890 triliun dan akhir desember 2017 total DPK yaitu sebesar 341,71 triliun dan pangsa pasar yang dicapai sebesar 5,78%. Hal ini menjelaskan bahwa Perbankan Syariah semakin menunjukkan perbaikan dimana sebelum adanya kebijakan *Office Channeling* pangsa pasar Perbankan Syariah masih dibawah 5%, sedangkan target Perbankan Syariah itu mencapai 5% agar dapat meningkatkan kualitas dan *market share* Perbankan Syariah sendiri. Setelah adanya kebijakan *Office Channeling* pertumbuhan Perbankan semakin meningkat dimana pada akhir 2017 mencapai 5,78% dan ini telah melampaui target yang ditetapkan. Artinya kebijakan *Office Channeling* membawa dampak positif bagi Perbankan Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Office Channeling* berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan dana pihak ketiga. Hal ini dikarenakan *Office Channeling* merupakan kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh kantor cabang yang dimaksudkan untuk meningkatkan jaringan masyarakat kepada jasa perbankan. Semakin

banyak kantor cabang syariah yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia maka akan semakin memudahkan masyarakat yang ingin menggunakan jasa Perbankan Syariah sehingga mengindikasikan akan semakin meningkat pula pertumbuhan dana pihak ketiga pada Perbankan Syariah.

Office Channeling merupakan mekanisme kerjasama kegiatan penghimpunan dana antara kantor cabang Syariah sebagai kantor induk dengan kantor Bank Konvensional bank yang sama dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Penerapan kebijakan *Office Channeling* atau layanan Syariah membuka peluang besar bagi Bank Konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah terhadap sistem syariah yang diterapkan dengan konsep perluasan jaringan, sehingga dapat meningkatkan DPK bank pada khususnya sedangkan secara makroekonomi sistem syariah ini menjadi alternative bagi perkembangan prekonomian dengan berdasarkan syariat islam.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Tenny Badina, Ina Indriani, Dan Yeni Jnuarsi, 2009. Bahwa kebijakan *Office Channeling* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga. Dengan jumlah DPK yang berhasil dihimpun oleh UUS rata-rata naik menjadi 11,6% hal ini menunjukan adanya hubungan yang kuat. Artinya setiap pembukaan atau penambahan jumlah kantor cabang maka jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun akan bertambah dengan diiringi

bertambahnya jumlah layanan syariah.⁶⁹ kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mery Lustiana Dan Efi Syarifudin, 2010. Dimana hasilnya bahwa kebijakan *Office Channeling* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga. Sebelum adanya kebijakan *Office Channeling* jumlah dana pihak ketiga sebesar 200 triliun, jumlah rata-rata 1.020 triliun. Dan sesudah keluarnya kebijakan OC jumlah dana pihak ketiga sebesar 300 triliun jumlah rata-rata 1.400 triliun, maka dapat disimpulkan pertumbuhan dana pihak ketiga setelah adanya kebijakan OC meningkat sebesar 50%. Setengahnya lebih besar dibandingkan sebelum keluarnya OC.⁷⁰

Hasil ini juga didukung oleh penelitian Moch. Edman Syarif M. muflih, 2011, Dengan memandang konsep perluasan jaringan yang diterapkan oleh kebijakan *Office Channeling* dengan cara memperbanyak kantor cabang maka konsep perluasan jaringan ini dapat diterima sebagai indikator untuk peningkatan pangsa pasar Perbankan Syariah, akan tetapi bank syariah tidak bisa hanya mengandalkan konsep ini saja masih harus disertai dengan pengenalan Perbankan Syariah kepada masyarakat, adapun beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:

1. Sosialisasi oprasional dan keuntungan adanya Perbankan Syariah
2. Mengedukasi para nasabah dan calon nasabah Perbankan Syariah

⁶⁹ Tenny Badina, Ina Indriani, Yeni Januarsi, "Dampak Office Channeling Terhadap Kenaikan Thirtd Party Deposits Dan Return On Asset Unit Usaha Syariah", *Media Riset Bisnis Dan Menejemen*, Vol. 9, No. 2, (Agustus 2009), h. 209.

⁷⁰ Meri Lustiana & Efi Syarifudin, " Pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Kebijakan *Office Channeling* Di Perbankan Indonesia", *Jurusan Ekonomi Syariah*, (2010).

3. Mempertahankan loyalitas nasabah Perbankan Syariah.⁷¹

Apabila poin-poin diatas telah diterapkan dengan baik maka konsep perluasan jaringan akan dapat diterima dengan sempurna karena didukung dengan kebijakan-kebijakan lainnya untuk mengenalkan masyarakat pada Perbankan Syariah, khususnya mengenai unit usaha syariah karena pengetahuan masyarakat mengenai UUS masih sangat minim. Perbankan Syariah sendiri sampai saat ini masih memerlukan banyak sumber daya manusia yang menguasai oprasional Perbankan Syariah. Untuk konsep perluasan jaringan sendiri dapat dilihat pada table 1.1 dimana disana dijelaskan untuk jumlah kantor cabang bank syariah dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami peningkatan untuk jumlah kantor dari keseluruhan bank yang menerapkan *Office Channeling*, dengan meningkatnya jumlah *Office Channeling* hal ini juga diiringi dengan peningkatan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga yang dilakukan oleh bank syariah. Artinya sistem *Office Channeling* dalam 5 tahun terakhir memberikan kontribusi yang baik terhadap pencapaian Perbankan Syariah khususnya pada Dana Pihak Ketiga (DPK).

Adapun *Office Channeling* dalam perspektif ekonomi islam berdasarkan fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia) tentang bunga (*interest?fa'idah*) pasal 2 angka 3 yang menyatakan “ untuk wilayah yang belum ada kantor cabang atau jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan

⁷¹ Moch. Edman Syarif, M. Muflih, “Komparasi Produktifitas Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada BUS dan UUS Pasca kebijakan *Office Channeling* Di Indonesia”, *Jurnal Keuangan Syariah*, (2011), h. 4.

kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurot/bajat*. *Office Channeling* dalam penerapannya menggunakan system *syirkah* (kerjasama) yang berarti *Al-ikhtilath* (penggabungan atau percampuran). Percampuran disini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Kerjasama dalam islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang dianjurkan terhadap agama islam selama kerjasama tersebut tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan, kerjasama yang di maksud di sini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama yang diterapkan dalam *Office Channeling* adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil dan kerjasama untuk berusaha memperoleh keuntungan antara bank konvensional sebagai bank induk dan bank syariah sebagai kantor cabang.

Berdasarkan implikasi *signaling theory* pada penelitian ini semakin banyak kantor cabang maka akan mengindikasikan bahwa semakin meningkat pula tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga pada Perbankan Syariah. Karena hal ini memberikan sinyal yang baik dan positif bagi para investor untuk terus melakukan penghimpunan dananya dan mempercayakan dananya pada Perbankan Syariah.

Namun kendati *Office Channeling* memberikan dampak positif bagi Perbankan Syariah, masih terdapat hambatan yang membuat penerapan *Office Channeling* belum optimal, dikarenakan kesiapan SDM (sumber daya manusia) yang belum memadai, dan kurangnya pemahaman masyarakat atas keberadaan *Office Channeling* di Kantor cabang. Bank konvensional juga turut mempengaruhi optimalisasi operasi *Office Channeling* ini. Terdapat dua hal yang menyebabkan *Office Channeling* tidak optimal dikarenakan masih adanya *Office Channeling* yang menggunakan sumber daya manusia (SDM) dari KC bank konvensional induknya sehingga mempengaruhi pemahamannya terhadap bank syariah, dan ini juga mempengaruhi kepada tingkat kepercayaan nasabah terhadap *Office Channeling*. Sedangkan, keberadaan *Office Channeling* yang berupa outlet unit syariah banyak yang kurang bisa dibedakan dengan outlet konvensional, bahkan banyak yang terkesan menyatu antara outlet unit syariah dengan konvensional. Ini lah yang menjadi ketidaknyamanan nasabah kalau berhubungan dengan *Office Channeling*.

Dalam jangka panjang diharapkan *Office Channeling* ini menjadi pusat pengkajian dan menjadi rujukan bagi pengembangan Ekonomi Islam media akselerasi bagi UUS untuk berpisah atau *spin off*. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia bahwa syarat *spin off* cukup bermodal Rp 500 miliar sehingga peluang *spin off* lebih cepat sebelum 15 tahun dari berlakunya UU tersebut. Dengan bank konvensional, seperti yang dijelaskan pada pasal 68, UU No 21/2008, Bank-Bank Umum

Konvensional yang memiliki UUS yang nilai assetnya telah mencapai sedikitnya 50% dari total nilai asset bank induknya atau 15 tahun setelah berlakunya UU No 21/2008 maka bank konvensional tersebut wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Untuk mendorong percepatan langkah yang dilakukan dalam rangka memenuhi target minimum modal *spin off* adalah peningkatan efektifitas *Office Channeling* UUS dengan target modal minimum, menerbitkan sukuk, dan menyuntikkan modal instan dari bank induknya.

Namun, menunggu terpenuhi modal minimum dari efektifitas *Office channeling* membutuhkan waktu yang lama, apabila sejumlah kendala dari kebijakan tersebut yang tidak segera teratasi maka akan mempengaruhi terpenuhinya *market share* pada UUS tersebut. Maka dari itu pemerintah harus mendukung sepenuhnya dalam realisasi kebijakan *Office Channeling* agar mampu memberikan kontribusi yang cepat dan baik terhadap pertumbuhan Perbankan Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan koefisien regresi menggunakan SPSS VERSI 23 dengan uji t Diperoleh t_{hitung} sebesar 4,574 dan t_{tabel} sebesar 2,709 dengan tingkat signifikan adalah 0,000, jika dibandingkan antara t_{tabel} dan t_{hitung} diperoleh $t_{hitung} (4,574) < t_{tabel} (2,709)$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan *Office Channeling* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah kantor cabang maka pertumbuhan dana pihak ketiga yang dapat dihimpun akan semakin meningkat, sehingga bank dapat memberikan pembiayaan kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan yang maksimal.

Total pencapaian Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 221.890 triliun dan akhir Desember 2017 total DPK yaitu sebesar 341,71 triliun dan pangsa pasar yang dicapai sebesar 5,78%. Hal ini menunjukkan bahwa *Office Channeling* memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi bank, untuk lebih memperhatikan lagi optimalisasi penerapan untuk kebijakan *Office Channeling* terutama dalam praktek kesyariahannya agar masyarakat dapat mempercayai keberadaan *Office Channeling* ini.
2. Kendati *Office Channeling* memberikan dampak positif bagi Perbankan Syariah, masih terdapat hambatan yang membuat penerapan *Office Channeling* belum optimal, dikarenakan kesiapan SDM (sumber daya manusia) yang belum memadai, dan kurangnya pemahaman masyarakat atas keberadaan *Office Channeling* di Kantor cabang dan juga kurangnya dukungan dari bank induk yang juga turut mempengaruhi optimalisasi operasi *Office Channeling*. Jadi harapannya untuk SDM lebih diperhatikan kembali dan bank induk harapannya juga dapat memberikan dukungan yang sepenuhnya agar dapat mengoptimalkan penerapan *Office Channeling*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Karim Adiwarman , *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Agung Nugroho Bhuono, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*, C.V Andi Offset, 2005.
- Agus Saputra Nasyah, “Kegiatan Usaha Perbankan Syariah”. Tesis Program Studi Perbankan Syariah, UMSurabaya, 2017.
- Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Menejemen Bank Syariah*, cet. 7 Jakarta: Azkia Publiker, April 2009.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Bin Ahmad Yasin Arham, *Mushab Ash-Shahib*, Hilal Media, 2015.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ke-4* Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- F Brigman dan Joel F Houaton Eungene, *Manajemen Keuangan* Jakarta: Erlangga, 2001.
- Ghozali Imam, *Aplikasi Analisis Multivariance Dengan Program IMB SPSS 21*, cet. Ke VIII, Semarang: Universitas Diponogoro, 2013.
- Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Hasan Zubairi, *Undang-undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hery, *Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive Edition* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016.
- Huda Qomarul, *Fiqh Muamalah, Cet-1* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ichsan Hasan Nurul, “*Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*” GP Press Group, 2014.

- Ifham Sholihin Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ismail, “*Akuntansi Bank Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah*”, Kencana: Prenadamedia Group, 2010.
- , *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, ke-1 Kencana: Prenamedia Group, 2010.
- Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Anallisis Investasi* Yogyakarta: BPEE UGM, 2000.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- , *Menejemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* Kencana: Kharisma Putra Utama, 2015.
- Moh. Pabunda Tika, , *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad, *Menejemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muthaer, Osmad “*Akuntansi Perbankan Syariah*”, Cet-1 Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (edisi revisi, cet. 14), PT Rineka Cipta, 2010.
- Rivai Veithzal, et.al, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Ed. 1, Cet. 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rochaeti Ety dkk, *Metode Penelitian Bisnis Dengan Aplikasi SPSS* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007.
- S Gazali & Rachmadi Usman Djoni, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Shari’ah Academy For Islamic Finance (ISRA Internasional), *Sistem Keuangan Islam Prinsip Dan Oprasional*, Cet. 1 Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2017.

Sujarweni V. Wiratna, *Metode Penelitian bisnis & Ekonomi* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Syafi'i Antonio Muhammad, "*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*", Cet-1 Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Triyuwono Iwan, *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, Dan Teori*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Umam Dan Setawan Budi Utomo Khotibul, "*Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya di Diindonesia*", Cet-2 Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Umam Kheirul, *Menejemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Usman Rahmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wahyu Winarno Wing, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.

Skripsi & Jurnal:

Alif Rachma, "*Pengaruh CAR, FDR dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Selselah Diterapkannya Kebijakan Sistem Office Chenneling dan Spin Off Periode 2011-2015*" (Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Heirennisa Rohaya, "*Perkembangan Skala Usaha Perbankan Syariah Di Indonesia Pra Dan Pasca Kebijakan Office Channeling*", *Jurnal ekonomi islam* UII, Vol.2 No.1 2008.

Ihsan Baik Siregar, "*Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Jumlah Kantor Terhadap Market Share Bank Syariah Di Indonesia priode 2012-2016*" *jurnal ekonomi syariah*, 2018.

Meri Lustiana & Efi Syarifudin, "*Pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Kebijakan Office Chenneling Di Perbankan Indonesia*", *Jurusan Ekonomi Syariah*, (2010).

Moch. Edman Syarief, M. Muflih, "*Komparasi Produktifitas Penghimpunan DPK Pada UUS Dan BUS Pasca Kebijakan Office Chenneling Di Indonesia*", *Jurnal Keuangan Syariah*, 2011.

Nasyah Agus Saputra, “Kegiatan Usaha Perbankan Syariah”. Tesis Program Studi Perbankan Syariah, UMSurabaya, 2017.

Tenny Badina, Ina Indriani, Yeni Januarsi, “Dampak Office Channeling Terhadap Kenaikan Third Party Deposits Dan Return On Asset Unit Usaha Syariah”, *Media Riset Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 9, No. 2, (Agustus 2009).

Teti Rahmawati, “Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Kebijakan *office channeling*”, *JRKA* Vol. 1 No. 2, 2015.

Triyani, “Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Office Chenelling Terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah Priode 2015-2017”, *Jurnal Perbankan Syariah*, 2018.

Yuliana Siti Chotimah, “Pengaruh Pengetahuan Nasabah Tentang *office chenelling* Terhadap Minat Mena bung Di Bank Syariah BRI Kartasura”, *Jurnal Perbankan Syariah*, 2017.

Praturan Perundang-Undangan

PBI No. 8/3/PBI/2006 *Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, Pasal 1 Ayat (17).

Internet:

Publikasi laporan keuangan, tersedia di: <http://www.bi.go.id> (10 maret 2019)

Lampiran

Data Office Channeling dan Dana Pihak Ketiga

Tahun	Office Channeling	Dana Pihak Ketiga (UUS)
2014	1.776	981.414
2014	3.022	1.353.075
2014	2.962	726.478
2014	2.656	7.991.822
2014	1.435	3.184.277
2014	1.226	270.429
2014	2.017	1.506.432
2014	1.023	400.228
2014	2.025	354.890
2015	1.518	2.461.242
2015	3.565	11.625.669
2015	5.362	21.719.128
2015	1.744	7.584.618
2015	2.571	7.532.274
2015	1.164	2.409.511
2015	2.871	7.991.389
2015	1.236	2.312.034
2015	1.031	2.481.315
2016	3.363	2.988.925
2016	4.436	12.904.947
2016	4.775	38.355.033
2016	1.976	10.628.776
2016	1.175	12.350.815
2016	1.264	3.815.421
2016	3.230	8.992.143
2016	1.721	4.542.401
2016	1.122	4.937.685
2017	1.953	12.594.094
2017	4.079	54.901.318
2017	5.002	54.691.156
2017	1.174	16.840.695
2017	2.016	14.230.699
2017	2.020	5.635.267
2017	3.935	9.934.456
2017	1.790	9.391.933
2017	1.122	4.940.970

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1327.57919043
Most Extreme Differences	Absolute	.127
	Positive	.127
	Negative	-.064
Test Statistic		.127
Asymp. Sig. (2-tailed)		.152 ^c

a. Test distribution is Normal.

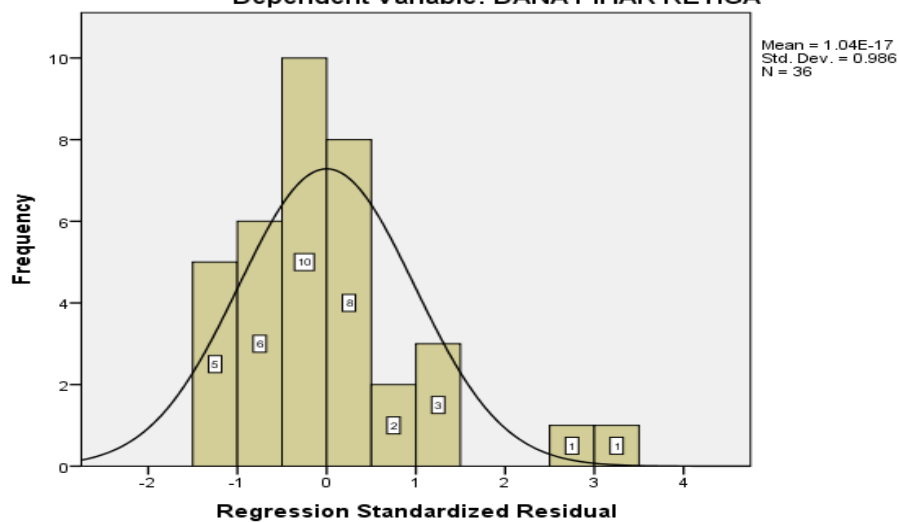
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.



Histogram

Dependent Variable: DANA PIHAK KETIGA



Uji Regresi linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1301.485	907.017		-1.435	.160
SQRT_X	85.195	18.627	.617	4.574	.000

a. Dependent Variable: SQRT_Y

Uji Parsial (Uji t)



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1301.485	907.017		-1.435	.160
SQRT_X	85.195	18.627	.617	4.574	.000

a. Dependent Variable: SQRT_Y



Uji Determinasi (r^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.617 ^a	.381	.363	1346.96093

a. Predictors: (Constant), SQRT_X

b. Dependent Variable: SQRT_Y